



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**

**PRIORITAS PLAFON  
ANGGARAN  
SEMENTARA  
(PPAS) KABUPATEN  
KAMPAR  
TAHUN 2023**

**BANGKINANG**

**2022**

## DAFTAR ISI

<b>PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2023</b> .....	1
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Penyusunan.....	2
1.3. Dasar Penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).....	3
<b>BAB II</b> .....	7
<b>RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b> .....	7
<b>BAB III</b> .....	9
<b>PRIORITAS BELANJA DAERAH</b> .....	9
3.1 Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Kampar Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023.....	9
3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kampar dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Riau.....	28
3.3 Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah; meliputi:.....	37
3.4 Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah.....	56
<b>BAB IV</b> .....	89
<b>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN</b> .....	89
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	89
4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.....	159
<b>BAB V</b> .....	160
<b>RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH</b> .....	160
<b>BAB VI</b> .....	161
<b>PENUTUP</b> .....	161

# PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2023

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah memberikan kewenangan kepada pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan segala sumber daya yang ada dalam kegiatan penyelenggaraan Pemerintah dengan semangat otonomi daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal penyelenggaraan pembangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar senantiasa mensinergikan antara agenda pembangunan Kabupaten Kampar dengan agenda pembangunan Provinsi dan Agenda pembangunan Nasional.

Prioritas pembangunan daerah tahun 2023 diarahkan untuk mengatasi issue strategis Pembangunan Daerah, permasalahan-permasalahan pembangunan yang berkembang, serta dengan memperhatikan kondisi objektif daerah. Prioritas pembangunan tentunya disusun untuk keberlanjutan pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi daerah Kabupaten Kampar sebagaimana tercantum dalam rencana jangka panjang daerah 2025, dimana pada tahun 2023 sudah memasuki tahapan kelima dari rencana jangka panjang dimaksud yang menitikberatkan pada *“Mewujudkan masyarakat yang berbudaya, berdaya dan agamis melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang yang dilandasi keunggulan komperatif perekonomian daerah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas”*. Selain itu prioritas pembangunan tahun 2023 juga tidak terlepas dari upaya untuk mewujudkan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.

Dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan prioritas pembangunan Kabupaten Kampar guna terwujudnya efektifitas dan efisiensi anggaran belanja daerah dan percepatan penanggulangan pandemic covid-19 sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka salah satu

prioritas pembangunan diarahkan kepada Penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan, Penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial.

Capaian kinerja pelaksanaan pembangunan, baik yang telah berhasil maupun yang belum sepenuhnya mencapai 100 persen telah memberikan pelajaran yang sangat berharga sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang. Beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah agar capaian kinerja pada tahun 2023 sesuai dengan yang ditargetkan antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan perencanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan dilakukan secara akurat dan cermat.
2. Meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, serta penjadwalan dan ketepatan waktu pelaksanaan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan dokumen yang memuat program prioritas dan plafon yang diberikan untuk setiap program dan kegiatan. Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah meliputi prioritas pembangunan daerah dan Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan program/kegiatan. Substansi PPAS mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari PD tersebut. Plafon anggaran sementara disusun berdasarkan urusan dan PD, program/kegiatan/subkegiatan dengan mempertimbangkan rencana pendapatan dan pembiayaan. Penyusunan PPAS mengacu kepada Kebijakan Umum APBD (KUA) yang selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara Eksekutif dan Legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023.

## **1.2. Tujuan Penyusunan**

Tujuan penyusunan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Kampar Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menjamin konsistensi antara hasil perencanaan yang sudah ditetapkan dalam RKPD dengan penganggaran.

2. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Kampar melalui komunikasi yang berkelanjutan dan berkualitas antara eksekutif dan legislatif.
3. Sebagai dasar dan acuan Penyusunan Rancangan APBD Tahun 2023.
4. Sebagai pedoman dan panduan bagi seluruh Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun 2023.

### **1.3. Dasar Penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).**

Dasar hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Kampar tahun 2023 adalah :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor );
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2007 Nomor 20);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 8);

22. Peraturan Bupati Kampar Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 9);
23. Peraturan Bupati Kampar Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 66); sebagaimana telah diubah empat kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Bupati Kampar Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 10);
24. Peraturan Bupati Kampar Nomor    Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 23).



## BAB II

### RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp.2.046.193.496.149,00 yang terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp1.974.198.221.812,00 dan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.71.995.274.337,00 Secara rinci target pendapatan dan penerimaan pembiayaan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022

#### Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>		
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>278.735.827.642</b>	
4.1.01	Pajak Daerah	154.143.211.242	
4.1.02	Retribusi Daerah	13.989.450.000	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.273.308.815	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	87.329.857.585	
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.695.462.394.170</b>	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.553.908.871.575	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	141.553.522.595	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.974.198.221.812</b>	
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>71.995.274.337</b>	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	71.995.274.337	
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>71.995.274.337</b>	
	<b>JUMLAH PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>2.046.193.496.149</b>	

## BAB III

### PRIORITAS BELANJA DAERAH.

Dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan prioritas pembangunan Kabupaten Kampar guna terwujudnya efektifitas dan efisiensi anggaran belanja daerah, prioritas pembangunan diarahkan kepada pilar pembangunan pada tahun 2023 yaitu; 1) Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi; 2) Memperkuat sistim kesehatan daerah; 3) Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing; 4) Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi; dan 5) Pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan, yang disinergikan dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Provinsi Riau diantaranya.

#### 3.1 Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Kampar Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Kampar Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 DUKUNGAN TERHADAP 7 PRIORITAS NASIONAL meliputi:

PN 1 adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.

PN 2 adalah mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

PN 3 adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing.

PN 4 Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan.

PN 5 memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dasar.

PN 6 membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

PN 7 adalah memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Kampar Terhadap

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 meliputi:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan, antara lain:
  - 1) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan.
    - a) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan.
    - b) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
    - c) Program Penanganan Kerawanan Pangan.
    - d) Program Pengawasan Keamanan Pangan.
  - 2) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan.
    - a) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.
    - b) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.
    - c) Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
    - d) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
  - 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata.
    - a) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.
    - b) Program Pemasaran Pariwisata.
    - c) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
  - 4) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
    - a) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.
    - b) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
    - c) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
    - d) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
    - e) Program Perizinan Usaha Pertanian.
    - f) Program Penyuluhan Pertanian.
  - 5) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian.
    - a) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.
    - b) Program Pengendalian Izin Usaha Industri.
    - c) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.
- b. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, antara lain:

- 1) Unsur Pendidikan dan Pelatihan.
  - a) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- 2) Unsur Penelitian dan Pengembangan.
  - a) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
  - a) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
  - a) Program Pengembangan Perumahan.
  - b) Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh.
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing, antara lain:
  - 1) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
    - a) Program Pengendalian Penduduk.
    - b) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB).
    - c) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).
  - 2) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
    - a) Program Pendaftaran Penduduk.
    - b) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
  - 3) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.
    - a) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
    - b) Program Penanggulangan Bencana.
    - c) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.
  - 4) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.
    - a) Program Pemberdayaan Sosial.
    - b) Program Rehabilitasi Sosial.
    - c) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
    - d) Program Penanganan Bencana.
    - e) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
  - 5) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.

- a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
  - b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.
  - c) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.
  - d) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
- 6) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.
- a) Program Pengelolaan Pendidikan.
  - b) Program Pengembangan Kurikulum.
  - c) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- 7) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- a) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
  - b) Program Perlindungan Perempuan.
  - c) Program Peningkatan Kualitas Keluarga.
  - d) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.
  - e) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).
  - f) Program Perlindungan Khusus Anak.
- 8) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- a) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.
  - b) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.
- 9) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja.
- a) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.
  - b) Program Penempatan Tenaga Kerja.
  - c) Program Hubungan Industrial.
- 10) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- a) Program Penataan Desa.
  - b) Program Peningkatan Kerjasama Desa.
  - c) Program Administrasi Pemerintahan Desa.
  - d) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
- 11) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

- a) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
  - b) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi.
  - c) Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian.
  - d) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM).
  - e) Program Pengembangan UMKM.
- 12) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal.
- a) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
  - b) Program Promosi Penanaman Modal.
  - c) Program Pelayanan Penanaman Modal.
  - d) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
  - e) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
- 13) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan.
- a) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.
  - b) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.
  - c) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
  - d) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.
  - e) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
- 14) Unsur Sekretariat Daerah.
- a) Program Perekonomian dan Pembangunan.
- 15) Unsur Kewilayahan (Kecamatan).
- a) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, antara lain:
- 1) Unsur Kepegawaian.
    - a) Program Kepegawaian Daerah.
  - 2) Urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
    - a) Program Pengembangan Kebudayaan.
    - b) Program Pengembangan Kesenian Tradisional
- e. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, antara lain:
- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
    - a) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
    - b) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

- c) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
- d) Program Penataan Bangunan Gedung.
- e) Program Penyelenggaraan Jalan.
- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
  - a) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
  - b) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.
  - a) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
  - b) Program Pengelolaan Pelayaran.
- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika.
  - a) Program Aplikasi Informatika.
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, antara lain:
  - 1) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.
    - a) Program Perencanaan Lingkungan Hidup.
    - b) Program Pengendalian Perencanaan Lingkungan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
    - c) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
    - d) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
    - e) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
    - f) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH.
    - g) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.
    - h) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.
    - i) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
    - j) Program Pengelolaan Persampahan.
- g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik, antara lain:

- 1) Unsur Sekretariat Daerah.
  - a) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- 2) Urusan Pemerintahan Umum.
  - a) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
  - b) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.
  - c) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
  - d) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
  - e) Program Keningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.
- 3) Unsur Sekretariat DPRD.
  - a) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.
- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika.
  - a) Program Informasi dan Komunikasi Publik.

Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Kampar Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 disajikan dalam table berikut:

**Tabel 3. 1 Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	<b>Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan</b>				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
			Persentase Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian		
				DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
			Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		
				DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
			Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		
				DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
			Persentase Pelaksanaan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		
				DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			
			Persentase Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Perizinan Usaha Pertanian		
				DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
			Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Usaha Pertanian		
				DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
			Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		
				DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Cangkupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten		
				INSPEKTORAT	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
			Persentase realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)		
				INSPEKTORAT	
<b>2</b>	<b>Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan</b>				
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
			Terlaksananya Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program Kabupaten/Kota		
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
			Pelatihan Bagi Pengurs Dan Anggota Koperasi		
				DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	
<b>3</b>	<b>Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing</b>				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		
				DINAS PENDIDIKAN	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Rata-rata Lama Sekolah		
				DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			
			Rata-rata Nilai UN SD dan SMP		
				DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
			Persentase Guru Berkualifikasi PAUD/SD/SMP/Non Formal		
				DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			
			Persentase Peningkatan Sistem Informasi Layanan Pendidikan		
				DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA			
			Terjaganya Kelestarian Bahasa Daerah Kampar		
				DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten		
				DINAS KESEHATAN	
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		
				DINAS KESEHATAN	
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
				DINAS KESEHATAN	
			persentase pelaksana penunjang pemerintahan daerah kabupaten / kota		
				DINAS KESEHATAN	
			persentase pelaksana penunjang pemerintahan daerah kabupaten / kota		
				DINAS KESEHATAN	
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		
				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Persentase Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Yang Menjalankan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Sesuai Dengan Standar		
				DINAS KESEHATAN	
			Persentase Puskesmas Dan Fasilitas Kesehatan Yang Menjalankan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Sesuai Dengan Standar		
				DINAS KESEHATAN	
			Persentase Puskesmas dan Fasilitas kesehatan yang menjalankan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai dengan standar		
				DINAS KESEHATAN	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			cakupan pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan	DINAS KESEHATAN	
			Cakupan Pemberdayaan dan pelayanan kepada Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
			Persentase Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Lainnya memenuhi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	DINAS KESEHATAN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			Persentase Puskesmas dan fasilitas kesehatan yang menjalankan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan yang Menjalankan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Puskesmas Dan Fasilitas Kesehatan Yang Menjalankan Upaya Promosi Kesehatan Dan Advokasi , Kemitraan Dan Pemberdayaan Masyarakat	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Puskesmas Dan Fasilitas Kesehatan Yang Menjalankan Upaya Promosi Kesehatan Dan Advokasi , Kemitraan Dan Pemberdayaan Masyarakat	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Puskesmas Dan Fasilitas Kesehatan Yang Menjalankan Upaya Promosi Kesehatan dan advokasi , kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	DINAS KESEHATAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
				SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Persentase Program Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kampar		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Persentase Program Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kampar		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		
				DINAS SOSIAL	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
			Jumlah PSKS yang Menangani PMKS		
				DINAS SOSIAL	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
			Jumlah Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial		
				DINAS SOSIAL	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Persentase Korban Bencana yang Tertangani		
				DINAS SOSIAL	
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan		
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
			Persentase Pelayanan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak		
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			
			Meningkatnya kualitas keluarga melalui partisipasi masyarakat dalam pembangunan		
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			
			tercapainya APE		
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
			Persentase pemenuhan hak anak		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
			Persentase pemenuhan perlindungan khusus anak		
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
			Tercapainya Pengelolahan Informasi Administrasi Kependudukan		
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase peningkatan kapasitas penatakelolaan pemerintahan desa yang akuntabel dan tertib administrasi		
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
			Total Fertility rate (TFR)		
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
			Ratio Akseptor KB		
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
			Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga		
				DINAS	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
			Persentase Informasi Publik yang disediakan		
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
			Persentase Jumlah OPD yang Terintegritas		
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		
				DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
			Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan		
				DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			
			Peningkatan Kesehatan Koperasi		
				DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
			Pelatihan Bagi Pengurus Dan Anggota Koperasi		
				DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
			Terbinanya UMK		
				DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
			Peningkatan Pemasaran Produk Unggulan Lokal UMK		
				DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
			Persentase Capaian Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
			Persentase Peningkatan Kegiatan Kepemudaan		
				DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
			Persentase Sarana Olahraga Masyarakat dengan kondisi baik		
				DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
			Jumlah Ketersediaan data dan Informasi		
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
			Index Keamanan Informasi		
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Tersedianya pengadaan barang milik daerah		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Tersedianya program pemeliharaan barang milik daerah		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Tersedianya program penunjang urusan pemerintah		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
			Adanya program pembinaan perpustakaan		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
			Persentase Pembinaan Perpustakaan		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			
			Persentase Pelestarian Koleksi Naskah Nasional dan Naskah Kuno		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
			Persentase Pengelolaan Arsip		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			
			Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Tersedianya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		
				DINAS PERIKANAN	
				DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
			Persentase Peningkatan Perizinan Bagi Pelaku Usaha		
				DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
			Peningkatan Sarana pasar		
				DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
			Peningkatan Pengendalian Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		
				DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
			Peningkatan standarisasi Peralatan Kemetrolgian		
				DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
			Peningkatan penggunaan Produk dalam negeri		
				DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		
				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			Persentase Terpenuhiya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		
				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat daerah		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			Persentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			Nilai SAKIP perangkat daerah		
				BADAN PENDAPATAN DAERAH	
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		
				BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
			Persentase pengelolaan BMD		
				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
			Persentase Pemenuhan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
			Persentase Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan daerah		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase cakupan layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten		
				INSPEKTORAT	
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
				INSPEKTORAT	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
			Persentase Penyelenggaraan Pengawasan		
				INSPEKTORAT	
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
			Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi		
				INSPEKTORAT	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		
				KECAMATAN TAPUNG	
				KECAMATAN TAMBANG	
				KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU	
				KECAMATAN RUMBIO JAYA	
			Meningkatkan Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Kinerja Aparatur yang Baik		
				KECAMATAN KAMPAR UTARA	
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		
				KECAMATAN KAMPAR UTARA	
				KECAMATAN SALO	
				KECAMATAN BANGKINANG KOTA	
				KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH	
				KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR	
				KECAMATAN PERHENTIAN RAJA	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		
				KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU	
				KECAMATAN SALO	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR	
<b>4</b>		<b>Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</b>			
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
			Jumlah Kebudayaan yang dikembangkan		
				DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
<b>5</b>		<b>Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar</b>			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
			Terlaksananya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang melalui Rencana Tata		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
			Terlaksananya Peningkatan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)		
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG			
			Terlaksananya Penataan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kampar		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		
				DINAS PERIKANAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)		
				DINAS PERIKANAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		
				BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
			Terselenggaranya Pengelolaan Pendapatan Daerah		
				BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
			Terselenggaranya Pengelolaan Pendapatan Daerah		
				BADAN PENDAPATAN DAERAH	
<b>6</b>		<b>Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim</b>			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase Kegiatan Perencanaan Lingkungan Hidup Terlaksana		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
			Persentase Program Pengelolaan Persampahan Terlaksana		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
<b>7</b>	<b>Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik</b>				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		
				DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
				DINAS SOSIAL	
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
			Persentase capaian program pengembangan iklim penanaman modal		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
			Persentase capaian program pelayanan penanaman modal		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
			Persentase capaian program pengendalian pelaksanaan penanaman modal		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		
				KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR	

### 3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kampar dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Riau

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kampar dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Riau; meliputi:

- a. Pengembangan Industri, antara lain :
  - 1) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian.
    - a) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.
    - b) Program Pengendalian Izin Usaha Industri.
    - c) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.
  - 2) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja.
    - a) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.
    - b) Program Penempatan Tenaga Kerja.
    - c) Program Hubungan Industrial.
  - 3) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal.
    - a) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
    - b) Program Promosi Penanaman Modal.
    - c) Program Pelayanan Penanaman Modal.
    - d) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
    - e) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
  - 4) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan.
    - a) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.
    - b) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.
    - c) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
    - d) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.
    - e) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
- b. Pengembangan Pertanian, antara lain :
  - 1) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan.
    - a) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan.
    - b) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
    - c) Program Penanganan Kerawanan Pangan.
    - d) Program Pengawasan Keamanan Pangan.
  - 2) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
    - a) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.
    - b) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
    - c) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan

Masyarakat Veteriner

- d) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
  - e) Program Perizinan Usaha Pertanian.
  - f) Program Penyuluhan Pertanian.
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan.
- a) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.
  - b) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.
  - c) Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
  - d) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- c. Pengembangan Pariwisata, antara lain :
- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata.
    - a) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.
    - b) Program Pemasaran Pariwisata.
    - c) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- d. Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, antara lain :
- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
    - a) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
    - b) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
    - c) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
    - d) Program Penataan Bangunan Gedung.
    - e) Program Penyelenggaraan Jalan.
    - f) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
  - 2) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
    - a) Program Pengembangan Perumahan.
    - b) Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh.
    - c) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
    - d) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
  - 3) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.
    - a) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
    - b) Program Pengelolaan Pelayaran.
  - 4) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.
    - a) Program Perencanaan Lingkungan Hidup.
    - b) Program Pengendalian Perencanaan Lingkungan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
    - c) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

- d) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
  - e) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
  - f) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH.
  - g) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.
  - h) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.
  - i) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
  - j) Program Pengelolaan Persampahan.
- e. Pengembangan SDM Yang Beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing, antara lain :
- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.
    - a) Program Pengelolaan Pendidikan.
    - b) Program Pengembangan Kurikulum.
    - c) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
  - 2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.
    - a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
    - b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.
    - c) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.
    - d) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
  - 3) Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.
    - a) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
    - b) Program Penanggulangan Bencana.
    - c) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.
  - 4) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.
    - a) Program Pemberdayaan Sosial.
    - b) Program Rehabilitasi Sosial.
    - c) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
    - d) Program Penanganan Bencana.
    - e) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
  - 5) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- a) Program Pengendalian Penduduk.
  - b) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB).
  - c) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).
- 6) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- a) Program Pendaftaran Penduduk.
  - b) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- 7) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- a) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
  - b) Program Perlindungan Perempuan.
  - c) Program Peningkatan Kualitas Keluarga.
  - d) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.
  - e) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).
  - f) Program Perlindungan Khusus Anak.
- 8) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- a) Program Penataan Desa.
  - b) Program Peningkatan Kerjasama Desa.
  - c) Program Administrasi Pemerintahan Desa.
  - d) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
- 9) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- a) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
  - b) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi.
  - c) Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian.
  - d) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM).
  - e) Program Pengembangan UMKM.
- 10) Urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
- a) Program Pengembangan Kebudayaan.
  - b) Program Pengembangan Kesenian Tradisional
- 11) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika.
- a) Program Informasi dan Komunikasi Publik.
  - b) Program Aplikasi Informatika.
- 12) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- a) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.
  - b) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.
- 13) Unsur Penelitian dan Pengembangan.



- a) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- 14)Unsur Sekretariat Daerah.
  - a) Program Perekonomian dan Pembangunan.
  - b) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- 15)Unsur Sekretariat DPRD.
  - a) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.
- 16)Unsur Kepegawaian.
  - a) Program Kepegawaian Daerah.
- 17)Unsur Pendidikan dan Pelatihan.
  - a) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- 18)Urusan Pemerintahan Umum.
  - a) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
  - b) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.
  - c) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
  - d) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
  - e) Program Keningkatan Kewaspadaan Nasiona dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.
- 19)Unsur Kewilayahan (Kecamatan).
  - a) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Prioritas Propinsi tercantum dalam table berikut:

Tabel 3. 2 Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Prioritas Pembangunan Propinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
59	Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		
				DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	382.315.700
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Rata-rata Lama Sekolah		
				DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.910.363.550
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase Guru Berkualifikasi PAUD/SD/SMP/Non Formal		
				DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	74.990.800
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		
				DINAS KESEHATAN	2.010.837.178
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
				DINAS KESEHATAN	1.682.792.800
			persentase pelaksana penunjang pemerintahan daerah kabupaten / kota		
				DINAS KESEHATAN	1.536.764.978
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		
				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	26.000.000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Persentase Puskesmas dan Fasilitas kesehatan yang menjalankan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat sesuai dengan standar		
				DINAS KESEHATAN	335.280.900
			Persentase Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan yang menjalankan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat sesuai standar		
				DINAS KESEHATAN	4.805.695.500
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	215.743.350
				DINAS SOSIAL	3.560.908.593
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
			Jumlah PSKS yang Menangani PMKS		
				DINAS SOSIAL	1.702.867.000
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			---		
				DINAS SOSIAL	339.614.500
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Persentase Korban Bencana yang Tertangani		
				DINAS SOSIAL	510.250.000
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara		
				DINAS SOSIAL	397.480.000
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan		
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	40.000.800
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			
			Meningkatnya kualitas keluarga melalui partisipasi masyarakat dalam pembangunan		
				DINAS PENGENDALIAN	2.300.000.250

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		
				DINAS KETAHANAN PANGAN	4.662.200
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	39.754.000
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
			Persentase Pelaksanaan Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian		
				DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	500.000.000
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
			Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		
				DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	944.916.000
<b>61</b>	<b>Daya Saing Daerah</b>				
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	662.809.800
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
			Persentase Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan daerah		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	405.474.500
<b>62</b>	<b>Pelayanan Publik</b>				
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Persentase Puskesmas dan Fasilitas kesehatan yang menjalankan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai dengan standar		
				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	4.645.121.945
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		
				SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA	8.551.226.629
				DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	1.079.550.320
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan		
				SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA	827.780.300
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
			Persentase Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		
				DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	90.000.140

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		
				DINAS SOSIAL	585.360.000
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			
			Terlaksananya program -program perencanaan tenaga kerja		
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	289.763.780
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan		
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	98.250.000
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
			Persentase pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan.		
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	232.000.000
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			Persentase jumlah kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)		
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	315.080.350
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
			Tercapainya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	600.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	159.099.650
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase peningkatan kapasitas penatakelolaan pemerintahan desa yang akuntabel dan tertib administrasi		
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	38.413.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	162.509.000
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
			Persentase capaian program pelayanan penanaman modal		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	332.781.500
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Kabupaten/ Kota		
				DINAS PERIKANAN	350.108.850
				DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	535.215.000
				DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	6.202.650
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	37.856.000
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
			Terlaksananya Perencanaan dan Pembangunan Industri		
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	959.999.700
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		
				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	34.372.714.569
			Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	7.200.000
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	127.688.900
			Nilai SAKIP perangkat daerah		
				BADAN PENDAPATAN DAERAH	73.327.950
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
			Terselenggaranya Pengelolaan Pendapatan Daerah		
				BADAN PENDAPATAN DAERAH	190.788.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	211.323.300
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
			Persentase Pemenuhan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	763.903.700
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
				INSPEKTORAT	197.109.000

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		
				KECAMATAN KAMPAR KIRI	1.994.000
			---		
				KECAMATAN TAPUNG HILIR	28.200.000
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		
				KECAMATAN TAPUNG	1.516.538.815
				KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR	1.801.099.042
			Meningkatkan Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Kinerja Aparatur yang Baik		
				KECAMATAN KAMPAR UTARA	728.471.466
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		
				KECAMATAN KAMPAR UTARA	14.752.000
				KECAMATAN BANGKINANG	1.979.342.791
				KECAMATAN BANGKINANG KOTA	2.274.806.320
				KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH	1.731.031.385
				KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR	1.558.004.784
				KECAMATAN PERHENTIAN RAJA	1.423.406.831
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			---		
				KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR	99.999.800
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase Terlaksananya program-program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		
				KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU	11.550.000

### 3.3 Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah; meliputi:

- a. Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi, antara lain :
  - 1) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan.
    - a) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan.
    - b) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
    - c) Program Penanganan Kerawanan Pangan.
    - d) Program Pengawasan Keamanan Pangan.
  - 2) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan.
    - a) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.
    - b) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.
    - c) Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
    - d) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata.
  - a) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.
  - b) Program Pemasaran Pariwisata.
  - c) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
  - a) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.
  - b) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
  - c) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
  - d) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
  - e) Program Perizinan Usaha Pertanian.
  - f) Program Penyuluhan Pertanian.
- 5) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian.
  - a) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.
  - b) Program Pengendalian Izin Usaha Industri.
  - c) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.
- 6) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja.
  - a) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.
  - b) Program Penempatan Tenaga Kerja.
  - c) Program Hubungan Industrial.
- 7) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal.
  - a) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
  - b) Program Promosi Penanaman Modal.
  - c) Program Pelayanan Penanaman Modal.
  - d) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
  - e) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
- 8) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan.
  - a) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.
  - b) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.
  - c) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
  - d) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.
  - e) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
- b. Memperkuat sistem kesehatan daerah, antara lain :
  - 1) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.
    - a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
    - b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.
    - c) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.

- d) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
- c. Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing, antara lain :
  - 1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.
    - a) Program Pengelolaan Pendidikan.
    - b) Program Pengembangan Kurikulum.
    - c) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
  - 2) Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.
    - a) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
    - b) Program Penanggulangan Bencana.
    - c) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.
  - 3) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.
    - a) Program Pemberdayaan Sosial.
    - b) Program Rehabilitasi Sosial.
    - c) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
    - d) Program Penanganan Bencana.
    - e) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
  - 4) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
    - a) Program Pengendalian Penduduk.
    - b) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB).
    - c) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).
  - 5) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
    - a) Program Pendaftaran Penduduk.
    - b) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
  - 6) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
    - a) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
    - b) Program Perlindungan Perempuan.
    - c) Program Peningkatan Kualitas Keluarga.
    - d) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.
    - e) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).
    - f) Program Perlindungan Khusus Anak.
  - 7) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
    - a) Program Penataan Desa.



- b) Program Peningkatan Kerjasama Desa.
  - c) Program Administrasi Pemerintahan Desa.
  - d) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
- 8) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- a) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
  - b) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi.
  - c) Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian.
  - d) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM).
  - e) Program Pengembangan UMKM.
- 9) Urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
- a) Program Pengembangan Kebudayaan.
  - b) Program Pengembangan Kesenian Tradisional
- 10) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika.
- a) Program Informasi dan Komunikasi Publik.
  - b) Program Aplikasi Informatika.
- 11) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- a) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.
  - b) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.
- 12) Unsur Penelitian dan Pengembangan.
- a) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- 13) Unsur Sekretariat Daerah.
- a) Program Perekonomian dan Pembangunan.
  - b) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- 14) Unsur Sekretariat DPRD.
- a) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.
- 15) Unsur Kepegawaian.
- a) Program Kepegawaian Daerah.
- 16) Unsur Pendidikan dan Pelatihan.
- a) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia..
- 17) Urusan Pemerintahan Umum.
- a) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
  - b) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.
  - c) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
  - d) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan

Budaya.

- e) Program Kenaikan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

18) Unsur Kewilayahan (Kecamatan).

- a) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

d. Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi, antara lain :

1) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

- a) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
- b) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
- c) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
- d) Program Penataan Bangunan Gedung.
- e) Program Penyelenggaraan Jalan.
- f) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

2) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

- a) Program Pengembangan Perumahan.
- b) Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh.
- c) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
- d) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

3) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.

- a) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
- b) Program Pengelolaan Pelayaran.

e. Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan, antara lain :

1) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.

- a) Program Perencanaan Lingkungan Hidup.
- b) Program Pengendalian Perencanaan Lingkungan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- c) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
- d) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- e) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- f) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH.
- g) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.
- h) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.

- i) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
- j) Program Pengelolaan Persampahan.

Tabel 3.3 Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah Kabupaten Kampar.

No	Prioritas Kabupaten	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi</b>					
		Berkurangnya tingkat kriminalitas					
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
				Persentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan			
					SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA	1.864.636.700	
		Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			
					SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA	13.121.434.515	
					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	792.745.780	
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.521.040.628	
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.950.827.434	
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	8.554.089.456	
					DINAS PERIKANAN	4.026.125.062	
					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	101.244.250	
					DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	16.757.179.226	
					SEKRETARIAT DAERAH	60.845.725.607	
					SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	48.276.030.671	
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
				Persentase Terpenuhinya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			
					SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	39.930.808.900	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	13.178.804.164	
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
				Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah			
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.776.501.050	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			
					BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.174.355.318	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
				Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah			
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.701.291.800	
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				

No	Prioritas Kabupaten	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase pengelolaan BMD			
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	823.429.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	6.605.887.599	
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
				Persentase Pemenuhan Program Kepegawaian Daerah			
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	4.232.245.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
				Persentase Pemenuhan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia			
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	923.903.700	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
					KECAMATAN KAMPAR KIRI	2.555.842.995	
					KECAMATAN TAPUNG HULU	1.817.365.204	
					KECAMATAN TAPUNG	2.263.251.367	
					KECAMATAN TAMBANG	2.673.319.167	
					KECAMATAN KAMPAR	3.333.740.558	
					KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU	2.077.018.413	
					KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR	463.941.399	
					KECAMATAN RUMBIO JAYA	1.575.878.213	
					KECAMATAN KAMPAR UTARA	599.701.992	
					KECAMATAN KAMPA	1.802.299.358	
					KECAMATAN SALO	1.356.510.908	
					KECAMATAN BANGKINANG	2.679.425.647	
					KECAMATAN BANGKINANG KOTA	2.949.713.552	
					KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH	2.232.493.600	
					KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR	2.028.785.590	
					KECAMATAN GUNUNG SAHILAN	1.447.313.665	
					KECAMATAN PERHENTIAN RAJA	1.948.200.799	
					KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU	1.495.776.750	
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.763.130.398	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik					
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				
				Persentase Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			
					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	580.000.260	
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				
				Terlaksananya Pelayanan dan penerbitan Dokumen Kependudukan			
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.800.000	
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL				
				Terlaksananya Pelayanan dan penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil			
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	720.000	

No	Prioritas Kabupaten	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
				Tercapainya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	600.000		
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					
				Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	560.000		
			PROGRAM PENATAAN DESA					
				Persentase penataan desa yang tertib administrasi				
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	274.957.000		
			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					
				Meningkatnya kerjasama antar desa dalam pengembangan ekonomi perdesaan				
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	199.996.800		
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
				Persentase peningkatan kapasitas penatakelolaan pemerintahan desa yang akuntabel dan tertib administrasi				
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.955.197.800		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
				Persentase pemberdayaan lembaga Masyarakat Desa, Lembaga Adat dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang dibina				
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	479.994.700		
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
				Persentase Informasi Publik yang disediakan				
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	3.805.180.250		
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
				Persentase Jumlah OPD yang Terintegritas				
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	3.250.592.450		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
				Jumlah Ketersediaan data dan Informasi				
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	90.589.000		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
				Index Keamanan Informasi				
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	288.981.550		
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				Persentase Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan				
					SEKRETARIAT DAERAH	738.445.200		
			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN					
				Persentase Pelaksanaan Program Pengelolaan Perbatasan				
					SEKRETARIAT DAERAH	249.996.000		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Persentase pemberdayaan lembaga Masyarakat Desa, Lembaga Adat dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang dibina				
					KECAMATAN KAMPAR KIRI	365.515.387		
					KECAMATAN KAMPAR	159.000.000		
					KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR	365.815.434		
					KECAMATAN BANGKINANG	667.400.000		
					KECAMATAN BANGKINANG KOTA	389.016.550		
					KECAMATAN KAMPAR KIRI	78.250.000		

No	Prioritas Kabupaten	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					HILIR			
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
				Persentase Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				
					KECAMATAN KAMPAR KIRI	19.800.000		
					KECAMATAN TAPUNG HULU	19.800.000		
					KECAMATAN TAPUNG	11.550.000		
					KECAMATAN TAMBANG	11.550.000		
					KECAMATAN KAMPAR	11.700.000		
					KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU	11.550.000		
				Persentase Terlaksananya program - program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				
					KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR	11.550.000		
				Persentase Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				
					KECAMATAN RUMBIO JAYA	19.800.000		
					KECAMATAN KAMPAR UTARA	14.850.000		
					KECAMATAN KAMPA	11.550.000		
					KECAMATAN SALO	11.550.000		
					KECAMATAN BANGKINANG	16.500.000		
					KECAMATAN BANGKINANG KOTA	14.850.000		
					KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH	19.800.000		
					KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR	11.550.000		
					KECAMATAN GUNUNG SAHILAN	11.550.000		
				Persentase Terlaksananya program - program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				
					KECAMATAN PERHENTIAN RAJA	16.500.000		
			Meningkatnya kualitas pemanfaatan sarana dan prasana agama					
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Persentase Pelaksanaan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				
					SEKRETARIAT DAERAH	17.254.898.000		
			Terciptanya toleransi antar multikultur					
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
				Persentase Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.390.306.600		
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
				Persentase Meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.009.758.500		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
				Persentase Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	667.181.650		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
				Persentase Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.078.677.650		
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
				Persentase Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Meningkatnya Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik sosial				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.042.862.900		
			---					

No	Prioritas Kabupaten	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	147.048.000		
				Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8.331.270.359		
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
				Persentase Program Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kampar				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7.902.574.315		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				---				
					DINAS PERHUBUNGAN	9.593.225.621		
				Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten				
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9.189.940.756		
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
				Persentase capaian program pengembangan iklim penanaman modal				
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	116.292.000		
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
				Persentase capaian program pelayanan penanaman modal				
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	765.851.500		
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
				Persentase Capaian Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal				
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	225.381.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.935.000		
				Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
					SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	122.280.000		
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
				Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten kampar				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.408.439.100		
				Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.250.663.600		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran				
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.304.340.849		
				Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat daerah				
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	12.567.827.730		
				Persentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	3.527.752.449		

No	Prioritas Kabupaten	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					DAERAH		
				Nilai SAKIP perangkat daerah			
					BADAN PENDAPATAN DAERAH	16.238.408.903	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
				---			
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	368.731.458.818	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
				Terselenggaranya Pengelolaan Pendapatan Daerah			
					BADAN PENDAPATAN DAERAH	3.847.451.100	
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
				Persentase Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Daerah			
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	337.505.000	
				Persentase Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan daerah			
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	799.781.500	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase cakupan layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten			
					INSPEKTORAT	90.850.000	
				Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
					INSPEKTORAT	15.787.557.028	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				
				Persentase Penyelenggaraan Pengawasan			
					INSPEKTORAT	4.284.210.000	
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				
				Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi			
					INSPEKTORAT	560.606.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				---			
					KECAMATAN TAPUNG HILIR	2.467.921.708	
					KECAMATAN TAMBANG	35.978.000	
				Meningkatkan Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Kinerja Aparatur yang Baik			
					KECAMATAN KAMPAR UTARA	728.471.466	
				---			
					KECAMATAN KUOK	1.610.768.516	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
				---			
					KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR	99.999.800	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
				---			
					KECAMATAN TAPUNG HILIR	11.550.000	
					KECAMATAN KUOK	11.550.000	
<b>2</b>	<b>Meningkatkan Perekonomian Daerah, Pariwisata dan Pengelolaan Industri</b>						
		Berkurangnya tingkat kriminalitas					
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	40.000.800	
		Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				
					DINAS PENGENDALIAN	131.487.750	



No	Prioritas Kabupaten	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
					DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	7.048.661.611	
					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	6.233.869.477	
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	6.608.164.858	
		Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah					
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
				Jumlah Daya Tarik Wisata			
					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	1.559.999.650	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
				Persentase publikasi dan event wisata			
					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	400.867.000	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
				Terlaksananya Perencanaan dan Pembangunan Industri			
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1.534.084.100	
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					
				Terlaksananya Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten			
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	99.531.650	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
				Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional ruang lingkup Kabupaten Kampar			
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	99.984.300	
		Menurunnya Tingkat Kemiskinan					
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
				Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan			
					DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	272.470.200	
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					
				Peningkatan Kesehatan Koperasi			
					DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	55.743.580	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
				Terbinanya UMK			
					DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	1.135.548.300	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
				Peningkatan Pemasaran Produk Unggulan Lokal UMK			
					DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	49.952.000	
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					
				Persentase Peningkatan Perizinan Bagi Pelaku Usaha			
					DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	158.899.500	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
				Peningkatan Sarana pasar			
					DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	68.010.950	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
				Peningkatan Pengendalian Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			

No	Prioritas Kabupaten	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	200.192.950		
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
				Peningkatan standarisasi Peralatan Kemetrolagian				
					DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	387.245.010		
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					
				Peningkatan penggunaan Produk dalam negeri				
					DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	93.554.000		
		Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka						
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA						
			Terlaksananya program -program perencanaan tenaga kerja					
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	289.763.780		
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						
			Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan					
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	372.000.000		
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						
			Persentase pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan.					
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	391.392.000		
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						
			Persentase jumlah kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)					
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	646.048.950		
		---						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota					
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	6.742.884.381		
			Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.186.157.576		
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						
			Persentase Pembinaan Perpustakaan					
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.205.968.050		
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO						
			Persentase Pelestarian Koleksi Naskah Nasional dan Naskah Kuno					
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	183.999.750		
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						
			Persentase Pengelolaan Arsip					
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	94.319.000		
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP						
			Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip					
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	87.387.900		
			Tersedianya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip					
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	205.444.400		
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						
			Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif					
					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	690.000.050		
<b>3</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial</b>							
		Berkurangnya tingkat kriminalitas						

No	Prioritas Kabupaten	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
				Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	271.999.800		
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
				Persentase Pelayanan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	100.000.000		
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
				Meningkatnya kualitas keluarga melalui partisipasi masyarakat dalam pembangunan				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.508.000.650		
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					
				tercapainya APE				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	75.321.450		
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
				Persentase pemenuhan perlindungan khusus anak				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	451.611.950		
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat					
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Persentase Puskesmas dan Fasilitas kesehatan yang menjalankan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai dengan standar				
					DINAS KESEHATAN	40.058.100		
					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8.094.501.845		
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
				Cakupan Pemberdayaan dan pelayanan kepada Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan				
					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	13.051.268.652		
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
				Total Fertility rate (TFR)				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	135.999.850		
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
				Ratio Akseptor KB				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	753.397.150		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
				Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	930.000.200		
			Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				

No	Prioritas Kabupaten	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	446.186.071.685	
					DINAS KESEHATAN	129.862.524.339	
					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	104.726.053.331	
					DINAS SOSIAL	7.875.827.593	
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.026.532.440	
		Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan					
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Rata-rata Lama Sekolah			
					DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	71.343.960.300	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					
				Rata-rata Nilai UN SD dan SMP			
					DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	434.114.450	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
				Persentase Guru Berkualifikasi PAUD/SD/SMP/Non Formal			
					DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	124.889.800	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
				Persentase Peningkatan Kegiatan Kepemudaan			
					DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	149.999.750	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
				Persentase Sarana Olahraga Masyarakat dengan kondisi baik			
					DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.739.192.200	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
				Peingkatan Kegiatan Kepramukaan bagi pemuda dan Siswa/i			
					DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	134.999.950	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik					
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
				Jumlah PSKS yang Menangani PMKS			
					DINAS SOSIAL	2.611.513.650	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
				Jumlah PMKS yang Mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial			
					DINAS SOSIAL	1.107.426.900	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
				Jumlah Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial			
					DINAS SOSIAL	945.440.660	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
				Persentase Korban Bencana yang Tertangani			
					DINAS SOSIAL	745.250.000	
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					
				Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara			
					DINAS SOSIAL	833.014.600	
		Terwujudnya penerapan nilai-nilai budaya Kampar yang agamis					
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
				Jumlah Kebudayaan yang dikembangkan			
					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	1.849.999.500	

No	Prioritas Kabupaten	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					
				Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang dibina				
					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	540.000.000		
		---						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten				
					DINAS KESEHATAN	2.940.507.958		
				Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
					DINAS KESEHATAN	25.102.308.753		
				persentase pelaksana penunjang pemerintahan daerah kabupaten / kota				
					DINAS KESEHATAN	1.027.883.854		
				persentase pelaksana penunjang pemerintahan daerah kabupaten / kota				
					DINAS KESEHATAN	1.536.764.978		
				Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				
					DINAS KESEHATAN	1.070.400.000		
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Persentase Puskesmas dan Fasilitas kesehatan yang menjalankan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat sesuai dengan standar				
					DINAS KESEHATAN	14.510.586.410		
				Persentase Puskesmas Dan Fasilitas Kesehatan Yang Menjalankan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Sesuai Dengan Standar				
					DINAS KESEHATAN	307.993.850		
				Persentase Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan yang menjalankan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat sesuai standar				
					DINAS KESEHATAN	11.171.138.650		
				persentase puskesmas dan pelayanan kesehatan yang menjalankan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat sesuai dengan standar				
					DINAS KESEHATAN	471.877.000		
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
				cakupan pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan				
					DINAS KESEHATAN	8.752.928.000		
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
				Persentase Puskesmas dan fasilitas Kesehatan Lainnya Memenuhi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman				
					DINAS KESEHATAN	19.925.850		
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
				---				
					DINAS SOSIAL	339.614.500		
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
				Persentase pemenuhan hak anak				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	761.316.500		
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					
				Tersedianya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	90.376.100		
<b>4</b>	<b>Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah</b>							
		Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				
					DINAS KETAHANAN PANGAN	4.244.216.329		
					DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	4.343.291.450		

No	Prioritas Kabupaten	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah						
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					
				Terlaksananya pemanfaatan pekarangan sebagai tambahan sumber gizi keluarga				
					DINAS KETAHANAN PANGAN	543.697.366		
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
				Angka Pola Pangan Harapan				
					DINAS KETAHANAN PANGAN	1.469.428.810		
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
				Tersusunnya peta kerentanan dan rawan pangan				
					DINAS KETAHANAN PANGAN	79.999.950		
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
				Terpantaunya mutu dan keamanan pangan				
					DINAS KETAHANAN PANGAN	144.301.600		
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
				Jumlah Produksi Perikanan Tangkap				
					DINAS PERIKANAN	1.967.075.000		
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
				Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)				
					DINAS PERIKANAN	6.263.239.700		
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
				Persentase Peningkatan Pengawasan dan Terjaganya Kelestarian Sumberdaya Perairan/Perikanan				
					DINAS PERIKANAN	817.234.000		
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
				Jumlah Produksi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (ton)				
					DINAS PERIKANAN	1.263.620.870		
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Persentase Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian				
					DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1.261.686.880		
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
				Persentase Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian				
					DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	4.941.526.450		
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
				Persentase Pelaksanaan Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian				
					DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	500.000.000		
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					
				Persentase Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Perizinan Usaha Pertanian				
					DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	334.634.000		
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
				Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				
					DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	944.916.000		
		---						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
					DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	10.281.621.644		
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				
					DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1.815.633.165		

No	Prioritas Kabupaten	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian			
					DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1.681.429.520	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
				Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian			
					DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2.018.963.685	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
				Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			
					DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1.511.218.280	
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				
				Persentase Pelaksanaan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian			
					DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	489.700.315	
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				
				Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Usaha Pertanian			
					DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	320.002.607	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
				Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			
					DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1.046.326.978	
<b>5</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas</b>						
		Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	15.853.658.055	
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	8.334.220.286	
					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	16.231.345.498	
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	15.089.857.351	
					KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR	1.801.099.042	
		Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai peruntukan					
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
				Rasio Irigasi Dalam Kondisi			
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6.523.825.600	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
				Meningkatnya Rasio Penduduk Berakses Air Bersih			
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.698.892.000	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
				Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi yang Layak untuk mencegah terjadinya Permukiman Kumuh, pencegahan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan di Kab. Kampar			
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.291.866.000	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
				Terwujudnya penyelenggaraan dan penataan bangunan gedung yang tertib			
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	25.975.674.899	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					

No	Prioritas Kabupaten	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan Dan Jembatan				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	95.934.387.236		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
				Terlaksananya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang melalui Rencana Tata				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	754.045.800		
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
				Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dbawah 10 Ha pada Daerah Kabupaten/Kota				
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	510.888.000		
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					
				Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	11.150.000.200		
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
				Terlaksananya Peningkatan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)				
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	15.487.547.383		
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
				Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	228.869.100		
			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG					
				Terlaksananya Penataan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kampar				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	89.708.400		
			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH					
				Pendataan Tanah Masyarakat Di Dalam Kawasan Hutan Negara				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	25.334.800		
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik					
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
				Persentase Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				
					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	1.088.375.050		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Persentase pemberdayaan lembaga Masyarakat Desa, Lembaga Adat dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang dibina				
					KECAMATAN BANGKINANG KOTA	342.983.001		
					KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR	287.750.000		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam					
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Persentase Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Terlaksana				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	400.000.000		
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
				Persentase Kegiatan Pengelolaan Kkeanekaragaman Hayati (KEHATI) Terlaksana				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	415.387.050		
			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					
				Persentase Kegiatan Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan Pplh Terlaksana				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	300.000.000		
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					



No	Prioritas Kabupaten	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Program Pengelolaan Persampahan Terlaksana			
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3.096.710.000	
		---	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				
				Menurunnya kawasan rawan genangan/banjir			
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7.806.259.500	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
				Terlaksananya Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program Kabupaten/Kota			
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	1.766.845.800	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
				---			
					DINAS PERHUBUNGAN	24.040.254.735	
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				
				---			
					DINAS PERHUBUNGAN	17.700.000	

### 3.4 Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Untuk mencapai sasaran prioritas program dan indikator yang akan dicapai pada APBD perlu ditetapkan program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerah yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Kampar. Prioritas ini disusun berdasarkan visi dan misi daerah yang akan dicapai.

Secara rinci prioritas pembangunan daerah Kabupaten yang memuat indikator yang akan dicapai terlihat pada table berikut.

Tabel 3.4 Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja Kabupaten Kampar Tahun 2023

Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja											
No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>											
	<b>1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya perencanaan dan evaluasi kinerja dikpora	12 Bulan	1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Kampar	
							1.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Kampar	
							1.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Kampar	
				1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan administrasi keuangan dinas dikpora	12 Bulan	1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Kampar	
							1.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	2 Dokumen	Kab. Kampar	

				Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Keuangan SKPD			
				1.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Kampar	
				1.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Kampar	
		1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan administrasi kepegawaian dinas dikpora	12 Bulan	1.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	"Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai"	4 Dokumen	Kab. Kampar
		1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan administrasi umum dinas dikpora	12 Bulan	1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	"Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan"	4 paket	Semua Kab/Kota Kab. Kampar
					1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	"Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan"	4 paket	Semua Kab/Kota Kab. Kampar
					1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	"Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan"	4 paket	Semua Kab/Kota Kab. Kampar
					1.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	7 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Kampar
					1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD"	3 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Kampar
					1.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	"Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD"	6 Dokumen	Kab. Kampar
		1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan sarana dan prasarana dinas dikpora	100 Persentase	1.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	"Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan"	1 unit	Semua Kab/Kota Kab. Kampar
		1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa penunjang perkantoran dikpora	12 Bulan	1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Kampar
					1.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan"	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Kampar
					1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan"	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Kampar
		1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pemeliharaan gedung dinas dikpora	24 Gedung	1.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	Semua Kab/Kota Kab. Kampar
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Lama Sekolah	9,50 Tahun	Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan dasar yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di lingkungan Kabupaten Kampar	523 lembaga	1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	36 ruang	Kab. Kampar
					1.01.02.2.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	10 Ruang	Kab. Kampar
					1.01.02.2.01.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Ruang	Kab. Kampar
					1.01.02.2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Ruang	Kab. Kampar
					1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	23 unit	Kab. Kampar
					1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	14 ruang	Kab. Kampar
					1.01.02.2.01.09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	47 Ruang	Kab. Kampar

				Sekolah/TU				
				1.01.02.2.01.11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	47 Ruang	Kab. Kampar	
				1.01.02.2.01.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	47 Unit	Kab. Kampar	
				1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	34 paket	Kab. Kampar	
				1.01.02.2.01.17 Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	4 Unit	Kab. Kampar	
				1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 paket	Kab. Kampar	
				1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	17592 Peserta didik	Kab. Kampar	
				1.01.02.2.01.24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	97 Satuan Pendidikan	Kab. Kampar	
				1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	240 Peserta Didik	Kab. Kampar	
				1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	550 orang/bulan	Kab. Kampar	
				1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi"	175 orang/bulan	Kab. Kampar	
				1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	495 Satuan Pendidikan	Kab. Kampar	
				1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	475 Satuan Pendidikan	Kab. Kampar	
				1.01.02.2.01.30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	486 Orang	Kab. Kampar	
				1.01.02.2.01.31 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	0 Ruang	Kab. Kampar	
		1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan menengah pertama yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di lingkungan Kabupaten Kampar	149 Lembaga	1.01.02.2.02.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 ruang	Kab. Kampar
					1.01.02.2.02.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	25 Ruang	Kab. Kampar
					1.01.02.2.02.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	25 Ruang	Kab. Kampar
					1.01.02.2.02.06 Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	25 Ruang	Kab. Kampar
					1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	14 unit	Kab. Kampar
					1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	15 unit	Kab. Kampar
					1.01.02.2.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Ruang	Kab. Kampar
					1.01.02.2.02.18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	Kab. Kampar
					1.01.02.2.02.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	35 Unit	Kab. Kampar

				1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	12 unit	Kab. Kampar	
				1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	3 Paket	Kab. Kampar	
				1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	5 Paket	Kab. Kampar	
				1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	"Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian"	13600 Peserta Didik	Kab. Kampar	
				1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	"Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Pendidikan Rekomendasi"	165 Satuan Pendidikan	Kab. Kampar	
				1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	240 Peserta Didik	Kab. Kampar	
				1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5450 Orang	Kab. Kampar	
				1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi"	100 orang/bulan	Kab. Kampar	
				1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	190 Satuan Pendidikan	Kab. Kampar	
				1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	190 Orang	Kab. Kampar	
				1.01.02.2.02.44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang	Kab. Kampar	
				1.01.02.2.02.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang	Kab. Kampar	
		1.01.02.2.03	Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan PAUD yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di lingkungan Kabupaten Kampar	350 Lembaga	1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	5 Unit	Kab. Kampar
					1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	20 Unit	Kab. Kampar
					1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	13 Paket	Kab. Kampar
					1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	2 Paket	Kab. Kampar
					1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	3 Paket	Kab. Kampar
					1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	16.544 Peserta didik	Kab. Kampar
					1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	594 Satuan Pendidikan	Kab. Kampar
					1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	2260 Orang	Kab. Kampar
					1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	150 Satuan Pendidikan	Kab. Kampar
					1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	594 Satuan Pendidikan	Kab. Kampar
					1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	700 Orang	Kab. Kampar
		1.01.02.2.04	Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan	18 Lembaga	1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	2700 Peserta didik	Kab. Kampar

			Nonformal/Kesetaraan	Nonformal/Kesetaraan yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di lingkungan Kabupaten Kampar						
					1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	17 Satuan Pendidikan	Kab. Kampar	
					1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2500 Orang	Kab. Kampar	
					1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	17 Satuan Pendidikan	Kab. Kampar	
					1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	17 Satuan Pendidikan	Kab. Kampar	
					1.01.02.2.04.22	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Terselenggaranya Ujian bagi Peserta Didik Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	17 Satuan pendidikan	Kab. Kampar	
<b>1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	Rata-rata Nilai UN SD dan SMP	55,13 Persen	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	645 Lembaga	Terselenggaranya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	4 Dokumen	Kab. Kampar	
					1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	100 Orang	Kab. Kampar	
			1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	360 Lembaga	Terselenggaranya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	4 Dokumen	Kab. Kampar	
<b>1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Persentase Guru Berkualifikasi PAUD/SD/SMP/Non Formal	28,67 Persen	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	834 Lembaga	Terwujudnya Pemerataan Penempatan Pendidik di setiap Lembaga	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 Dokumen	Kab. Kampar	
					1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	21 Laporan	Kab. Kampar	
<b>1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN</b>	Persentase Peningkatan Sistem Informasi Layanan Pendidikan	100 Persen	1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	25 Dokumen	Kab. Kampar	
<b>1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA</b>	Terjaganya Kelestarian Bahasa Daerah Kampar	5 Jenis	1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	150 Orang	Meningkatnya Mutu Pendidik yang terbina Penggunaan Bahasa dan Sastra Daerah	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun	1 Kamus	Kab. Kampar	
<b>1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>										
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Kampar	
					100 %	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
						1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Kampar
						1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	Semua Kab/Kota

				Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		a Kab. Kampar
				1.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Kampar
				1.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Kampar
				1.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Kampar
				1.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Kampar
		1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan 100 Persen Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 %	1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	"Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN" Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3530 orang/bulan 269 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Kampar
				1.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan 1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Kampar
		1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terlaksananya administrasi kepegawaian 100 Persen Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat 100 %	1.02.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	Kab. Kampar
				1.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	62 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Kampar
				1.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang 43 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Kampar
		1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum 100 Persen Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 %	1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket 10 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Kampar
				1.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	85 paket 6 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Kampar
				1.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Kab. Kampar
				1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	"Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan" Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket 12 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Kampar
				1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	"Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan" Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket 12 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Kampar
				1.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Kampar
				1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD" Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan 40 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Kampar

		1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Barang Milik Daerah 4 Unit Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.02.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Kampar
		1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 Persen  Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan	1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan  12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Kampar
				1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan"	12 Laporan  12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Kampar
		1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 Persen	1.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	"Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya"	2 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Kampar
				1.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	"Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya"	5 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Kampar
				1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Kampar
				1.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"	2 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Kampar
		1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 100 Persen  Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD 1 Tahun  Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 100 Persen  Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 100 Persen	1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan menunjang pelayanan  jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan menunjang pelayanan  Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan menunjang pelayanan  Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan menunjang pelayanan  Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan menunjang pelayanan  Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan menunjang pelayanan  Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan menunjang pelayanan  Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan menunjang pelayanan  "Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan"  "Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan"  Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan"  Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja  1 unit kerja  1 unit kerja  1 unit kerja  1 Unit kerja  1 Unit Kerja  1 Unit Kerja  1 Unit Kerja  1 Unit Kerja  31 Puskesmas  0 Unit Kerja  1 Unit Kerja  1 UNIT KERJA  1 Unit Kerja  1 Unit Kerja  1 Unit Kerja	Semua Kab/Kota Kab. Kampar

					Jumlah blud yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan (97) 1 unit kerja Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (No.97) 1 Unit Kerja Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan ( No. 97) 1 UNIT KERJA Tersedia Pelayana dan Penunjang Pelayanan BLUD 1 Unit Kerja		
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan yang menjalankan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat sesuai standar 100 Persen Persentase Puskesmas dan Fasilitas kesehatan yang menjalankan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai dengan standar 100 Persen	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan yang menjalankan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat sesuai standar 100 Persen Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 100 %	1.02.02.2.01.01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 1 Unit	Kab. Kampar	
				1.02.02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun 10 Unit	Kab. Kampar	
				1.02.02.2.01.03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 0 Unit	Kab. Kampar	
				1.02.02.2.01.04 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun 31 Unit		
				1.02.02.2.01.05 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 1 Unit	Kab. Kampar	
				1.02.02.2.01.08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit 10 Unit	Kab. Kampar	
				1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 31 Unit	Kab. Kampar	
				1.02.02.2.01.11 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan 31 Unit	Kab. Kampar	
				1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 31 Unit	Kab. Kampar	
				1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 31 Unit	Kab. Kampar	
				1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 31 Unit	Kab. Kampar	
				1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 25 Unit	Kab. Kampar	
				1.02.02.2.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center 93 Unit Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center 3 Unit	Kab. Kampar	
				1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan 1 paket Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan 3 Paket	Kab. Kampar	
				1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan 1 Paket	Kab. Kampar	



				1.02.02.2.01.18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	31 Unit	Kab. Kampar
			Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP 100 % Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota		Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	496 orang	
			Terlaksananya Penyediaan Layanan kesehatan untuk 100 Persen UKM dan UKP Rujukan		jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	192 orang	
			Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk 100 persen UKM dan UKP Rujukan		jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	250 orang	
			Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk 100 Persen UKM dan UKP Rujukan		jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	445 orang	
			Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk 100 Persen UKM dan UKP Rujukan		jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	609 orang	
			Tersedianya Pelayanan Kesehatan untuk 100 Persen UKM dan UKP Rujukan		jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	856 orang	
					Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	350 orang	
					Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	350 Orang	
					Jumlah ibu hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	1171 Orang	
					Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	324 Orang	
					"Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	180 Orang	
		1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	"Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	397 Orang	Semua Kab/Kot a Kab. Kampar
					"Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	500 Orang	
					"Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	663 Orang	
					"Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	788 orang	
					"Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	812 Orang	
					"Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	970 orang	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	81 Orang	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	235 Orang	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	280 orang	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	400 Orang	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	629 Orang	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	713 Orang	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	963 Orang	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1177 orang	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1962 orang	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19583 orang	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	580 orang	

					Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	
					Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1110 Orang	
					Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	556 Orang	
					terkelolanya pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	200 orang	
					Jumlah BULIN yg mendapatkan pelayanan kes sesuai standar	212 orang	
					jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	182 orang	
					jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	250 orang	
					jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	581 orang	
					jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	817 orang	
					jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1962 orang	
					jumlah ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	425 orang	
					Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	473 orang	
					Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1060 Orang	
					Jumlah Ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	919 Orang	
					Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	1118 Orang	
					"Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	50 Orang	
					"Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	180 Orang	
					"Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	445 orang	
					"Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	752 Orang	
				1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	"Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	775 Orang	Kab. Kampar
					"Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	950 orang	
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	77 Orang	
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	225 Orang	
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1124 orang	
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18582 orang	
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	635 Orang	
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	267 orang	
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	400 Orang	
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	600 Orang	
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	681 Orang	
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	752 orang	
					Jumlah Ibu Bersalin Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	310 Orang	
					"Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	416 Orang	
					Standar"Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"		

					Jumlah ibu Bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	505 Orang		
					terkelolanya pelayanan ibu bersalin sesuai standar	200 orang		
					Terkelolanya Pelayanan Ibu Bersalin Sesuai Standar	200 Orang		
					Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	342 orang		
					jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	176 orang		
					jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	240 Orang		
					jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	300 orang		
					jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	405 orang		
					jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	778 orang		
					jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1869 orang		
					Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	451 orang		
					Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	1066 Orang		
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1010 Orang		
					"Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	738 Orang		
					"Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	150 Orang		
					"Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	200 ORANG		
					"Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	396 Orang		
					"Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	500 Orang		
				1.02.02.2.02.03	"Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	716 orang		Kab.
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	"Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	922 orang		Kampar
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73 Orang		
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	225 Orang		
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	875 Orang		
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1070 orang		
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17872 orang		
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	603 Orang		
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang		
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 orang		
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	572 Orang		
					Jumlah Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	255 Orang		
					Jumlah Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	295 Orang		
					jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	553 orang		
					jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	791 Orang		
					Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	504 Orang		
					Jumlahu Bayi Baru Lahir yang	400 Orang		

					Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar terkelolanya pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	200 orang	
					jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	200 orang	
					jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	240 Orang	
					jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	300 orang	
					jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	878 orang	
					jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2018 orang	
					jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2040 orang	
					jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2273 orang	
					jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7672 orang	
					Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2300 orang	
					Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan Kesehatan Sesuai standar	251 orang	
					Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3080 Orang	
					Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4090 Orang	
					Jumlah Balita yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	5439 Orang	
					"Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	700 Orang	
					"Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	1975 orang	
				1.02.02.2.02.04	"Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	2366 orang	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	"Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	3658 Orang	Kab. Kampar
					"Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	3768 Orang	
					Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	
					Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	276 Orang	
					Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4469 orang	
					Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5465 orang	
					Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	65538 orang	
					Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	1800 Orang	
					Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	
					Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2000 Orang	
					Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2212 Orang	
					Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1300 Orang	
					Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1505 Orang	
					"Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	3543 orang	
					jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	6159 Orang	
					Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai	2102 Orang	

					strandar		
					Jumlah Balita yg mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1600 orang	
					Jumlah anak usia pendidikan dasar sesuai standar	6296 Orang	
					jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan kesehatan sesuai standar	2568 orang	
					jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	796 orang	
					jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	810 orang	
					jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	851 Orang	
					jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	900 orang	
					jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2040 orang	
					Jumlah anak usia pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7500 Orang	
					Jumlah anak usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	397 orang	
					"Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	610 Orang	
					"Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	2712 orang	
					"Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	3120 Orang	
				1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	"Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	3500 Orang	Kab. Kampar
					"Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	3768 orang	
					"Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	5226 Orang	
					"Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	6914 orang	
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	350 Orang	
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4400 orang	
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15942 Orang	
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	650 Orang	
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4000 Orang	
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1640 Orang	
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1281 Orang	
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1842 Orang	

					Jumlah Anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	1599 Orang	
					Jumlah anak usia pendidikan dasar yg mendapat pelayanan kesehatan	3000 orang	
					jumlahJumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2253 orang	
					Teraksalananya pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	1100 Orang	
					terkelolanya pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	1400 orang	
					Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	1355 Orang	
					jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	582 orang	
					jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1188 orang	
					jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4621 orang	
					jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5952 orang	
					jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6000 orang	
					Jumlah Penduduk usia produktif yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	5984 Orang	
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5000 Orang	
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2254 Orang	
					"Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	456 orang	
				1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	"Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	1500 Orang	Kab. Kampar
					"Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	5000 Orang	
					"Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	7604 orang	
					"Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	16200 orang	
					"Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	22706 Orang	
					"Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	28145.28 orang	
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	753 Orang	
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6000 Orang	
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8979 orang	
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10979 orang	
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12055 orang	

					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	136691 orang	
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	900 Orang	
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4100 Orang	
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4961 Orang	
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17208 Orang	
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2000 Orang	
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1355 Orang	
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2611 Orang	
					jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9126 orang	
					jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	2000 orang	
					Jumlah usia produktif yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	15374 Orang	
					Jumlah usia produktif yg mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	950 orang	
					Jumlah penduduk usia yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	635 orang	
					Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	1017 Orang	
					Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1482 orang	
					Jumlah Penduduk Usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	527 orang	
					jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	932 orang	
					jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1000 orang	
					jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1145 orang	
					jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3866 orang	
				1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia lanjut yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	2204 Orang	Kab. Kampar
					"Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	700 Orang	
					"Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	746 Orang	
					"Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	755 Orang	
					"Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	1430 orang	
					"Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	1482 Orang	
					"Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	1527 Orang	
					"Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"	1700 orang	

					<p>Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar"</p> <p>"Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar" 1745 orang</p> <p>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 152 Orang</p> <p>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1000 Orang</p> <p>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1811 Orang</p> <p>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2215 orang</p> <p>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 36972 orang</p> <p>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar" 900 Orang</p> <p>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1500 Orang</p> <p>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang</p> <p>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1183 Orang</p> <p>Jumlah Penduduk Usia Lanjut Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 900 Orang</p> <p>jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai stnadar 8020 orang</p> <p>jumlah penduduk usia Lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 826 orang</p> <p>jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 200 orang</p> <p>jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5262 orang</p>	
				<p>1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</p>	<p>jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan 21873 orang</p> <p>jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 273 orang</p> <p>jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 800 orang</p> <p>jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 843 orang</p> <p>Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 20 orang</p> <p>Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1000 Orang</p> <p>Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar 1597 Orang</p> <p>Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2349 Orang</p> <p>Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2964 Orang</p> <p>Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang</p> <p>Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 65 Orang</p> <p>Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 232 orang</p> <p>Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 500 Orang</p> <p>Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 550 orang</p> <p>Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 800 Orang</p> <p>Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 866 orang</p> <p>Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1000 Orang</p> <p>Jumlah Penderita Hipertensi 1200 orang</p>	<p>Kab. Kampar</p>



					<p>yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</p> <p>Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1200 Orang</p> <p>Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3721 Orang</p> <p>Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5689 Orang</p> <p>Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 6528 Orang</p> <p>Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 7440 Orang</p> <p>Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 8404 orang</p> <p>Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 42849 Orang</p> <p>Jumlah Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 20 Orang</p> <p>Jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1051 Orang</p> <p>jumlah penderita Hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 3307 orang</p>		
				<p>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 1500 Orang</p> <p>jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan 200 orang</p> <p>Jumlah Penderita Diabetes Melitus Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 200 Orang</p> <p>jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 25 orang</p> <p>jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 174 orang</p> <p>Jumlah Penderita Diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 500 Orang</p> <p>Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar 391 Orang</p> <p>"Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar" 135 Orang</p> <p>"Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar" 137 orang</p> <p>"Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar" 150 Orang</p> <p>"Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar" 250 Orang</p> <p>"Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar" 275 Orang</p> <p>"Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar" 310 orang</p> <p>"Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar" 325 orang</p> <p>"Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar" 766 orang</p> <p>Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 43 Orang</p> <p>Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 190 Orang</p> <p>Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 700 Orang</p>	<p>1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus</p>	Semua Kab/Kota dan Kab. Kampar	

					Standar		
					Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5108 Orang	
					Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	
					Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	210 Orang	
					jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	301 orang	
					jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	241 Orang	
					Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	191 Orang	
					jumlah penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	302 orang	
					jumlah penderita diabetes militus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	209 orang	
					Jumlah Penderita Diabetes yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	87 Orang	
					Jumlah Penderita Diabetes yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	113 Orang	
					jumlah penderita diabetes melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	26072 orang	
					Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	300 orang	
					Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus sesuai standar	423 Orang	
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	25 orang	
					jumlah orang mendapatkan pelayanan kesehatan dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	54 orang	
					jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	21 orang	
					jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	36 orang	
					jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	200 orang	
					jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	300 orang	
				1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	18 orang	Kab. Kampar
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	18 Orang	
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	20 orang	
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	38 orang	
					Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai Standar	72 Orang	

				"Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar"	7 Orang	
				"Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar"	20 orang	
				"Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar"	25 Orang	
				"Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar"	35 orang	
				"Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar"	38 orang	
				"Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar"	50 Orang	
				"Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar"	55 Orang	
				"Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar"	80 orang	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5 Orang	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	12 Orang	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	129 orang	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	889 Orang	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	
				Jumlah Orang Yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	35 orang	
				Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	200 Orang	
				jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	46 orang	
				Jumlah orang yang mendapat pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	36 Orang	
				Terlaksananya pelayanan kesehatan dengan gangguan jiwa berat	24 Orang	
				jumlah orang terduga menderita tuberkolosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	20 orang	
			1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	jumlah orang terduga menderita tuberkolosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	300 orang	Kab. Kampar
				jumlah orang terduga menderita tuberkolosis yang mendapatkan sesuai standar	84 Orang	

				Jumlah orang terduga menderit tuberculosis yang mendapatkan Pelayanaa Sesuai Standar	168 Orang
				jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuia standar	1520 orang
				jumlah orang terduga menderit tuberculosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	78 orang
				jumlah orang terduga menderit tuberculosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	297 orang
				Jumlah orang terduga menderit tuberculosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	13 orang
				Jumlah orang terduga menderit tuberculosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	56 Orang
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	11 Orang
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	13 orang
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	50 Orang
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	60 Orang
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	61 Orang
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	77 orang
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	94 orang
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	150 Orang
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	200 orang
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	400 Orang
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	470 Orang
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	875 Orang
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1616 orang
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	14791 Orang
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	160 Orang
				Jumlah orang terduga menderit tuberculosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai strandar	30 Orang
				Jumlah orang terduga TB yg mendapatkan pelayanan sesuai standar	200 orang
				"Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	373 orang

					Standar"		
					jumlah penderita terduga tb yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	729 orang	
					Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bagi orang terduga tuberkulosis	236 Orang	
					jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 orang	
					jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	365 orang	
					jumlah orang terduga menderita hiv yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	465 orang	
					jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	870 orang	
					jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	10 orang	
					Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	259 Orang	
					Jumlah Orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1035 Orang	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Hiv Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10 Orang	
					"Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar"	4 Orang	
					"Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar"	5 Orang	
					"Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar"	322 Orang	
				1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	"Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar"	436 Orang	Semua Kab/Kota dan Kab. Kampar
					"Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar"	445 orang	
					"Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar"	772 Orang	
					"Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar"	1023 orang	
					"Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar"	2454 Orang	
					"Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar"	20270 Orang	
					"Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	768 orang	
					Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	89 Orang	
					Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	302 orang	
					Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1000 Orang	
					Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1826 orang	
					Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	
					Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan	0 Orang	

					Sesuai Standar		
					Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	
					Jumlah orang terduga menderita HIV yg mendapat pelayanan sesuai standar	100 orang	
					Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	556 Orang	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	55 Orang	
					Terlaksananya pelayanan kesehatan dengan resiko HIV	24 orang	
					jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (klb) sesuai standar	8 dokumen	
					jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa(klb) sesuai standar	6 dokumen	
					jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) sesuai standar	17 Dokumen	
					jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) sesuai Standar	3 Dokumen	
					jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) sesuai Standar	4 Dokumen	
					Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) sesuai standar	1 Dokumen	
					Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) sesuai standar	3 dokumen	
					Jumlah Dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	18 Dokumen	
				1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) sesuai standar	5 Dokumen	Kab. Kampar
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	0 Dokumen	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	2 dokumen	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	2 Dokumen	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	3 Dokumen	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	4 Dokumen	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	7 dokumen	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	7 Dokumen	

					<p>Biasa (KLB) Sesuai Standar</p> <p>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 7 orang</p> <p>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 8 dokumen</p> <p>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 8 Dokumen</p> <p>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 9 Dokumen</p> <p>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 9 DOKUMEN</p> <p>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 10 dokumen</p> <p>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 75 Orang</p> <p>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 4 Dokumen</p> <p>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 5 Dokumen</p> <p>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa sesuai standar 12 Dokumen</p> <p>jumlah terjadinya kasus klb yang mendapatkan pelayanan sesuai standar 10 dokumen</p> <p>Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasah 7 Dokumen</p>		
				<p>1.02.02.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 0 Dokumen</p> <p>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 1 Dokumen</p> <p>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 4 Dokumen</p> <p>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 8 dokumen</p>	Kab. Kampar	
				<p>1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</p>	<p>jumlah dokumen hasil pengelolaan kesehatan gizi masyarakat 3 dokumen</p> <p>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan gizi masyarakat 84 Dokumen</p> <p>jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat 5 dokumen</p> <p>jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat 6 dokumen</p> <p>jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat 8 dokumen</p> <p>jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat 17 Dokumen</p>	Kab. Kampar	

					<p>pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat 15 dokumen</p> <p>Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Gizi Masyarakat 2 Dokumen</p> <p>Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat 8 Dokumen</p> <p>Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 18 Dokumen</p> <p>Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi Masyarakat "Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat" 3 Dokumen</p> <p>"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat" 4 Dokumen</p> <p>"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat" 7 Dokumen</p> <p>"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat" 8 dokumen</p> <p>"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat" 9 DOKUMEN</p> <p>"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat" 10 dokumen</p> <p>"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat" 21 dokumen</p> <p>"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat" 25 dokumen</p> <p>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 2 dokumen</p> <p>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 2 Dokumen</p> <p>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 7 dokumen</p> <p>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 7 Dokumen</p> <p>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 9 Dokumen</p> <p>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 31 Dokumen</p> <p>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 5 Dokumen</p> <p>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 Dokumen</p> <p>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 4 Dokumen</p> <p>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 5 Dokumen</p> <p>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 10 Dokumen</p> <p>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 26 Dokumen</p>		
				1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	<p>Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga 2 Dokumen</p> <p>JUMLAH DOKUMEN HASIL PENGELOLAAN KESEHATAN KERJA 3 dokumen</p> <p>jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga 2 dokumen</p> <p>jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga 5 dokumen</p> <p>jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga 6 dokumen</p> <p>jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga 8 dokumen</p> <p>jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga 17 Dokumen</p> <p>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga 12 Dokumen</p>	Kab. Kampar	



					Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga	6 Dokumen		
					"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga"	4 Dokumen		
					"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga"	7 dokumen		
					"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga"	7 Dokumen		
					"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga"	8 dokumen		
					"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga"	8 Dokumen		
					"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga"	9 Dokumen		
					"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga"	9 DOKUMEN		
					"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga"	10 dokumen		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	7 dokumen		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	7 Dokumen		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	31 Dokumen		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokumen		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	18 Dokumen		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olahraga	4 Dokumen		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kesehatan Kerja Dan Olahraga	5 Dokumen		
					jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehtan kerja dan olahraga	5 dokumen		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	18 Dokumen		
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan layanan kesehatan lingkungan	132 Dokumen		
					jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	3 dokumen		
				1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	4 Dokumen		Kab. Kampar
					jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	5 dokumen		
					jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	6 dokumen		
					jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	8 dokumen		
					jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	17 Dokumen		

					Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan	11 Dokumen	
					"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan"	2 dokumen	
					"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan"	4 Dokumen	
					"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan"	7 Dokumen	
					"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan"	8 dokumen	
					"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan"	9 Dokumen	
					"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan"	9 DOKUMEN	
					"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan"	10 dokumen	
					"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan"	100 dokumen	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 dokumen	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Dokumen	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7 Dokumen	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	62 Dokumen	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 Dokumen	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8 Dokumen	
					jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	10 dokumen	
					jumlah dokumen hasil pengolahan pelayanan kesehatan lingkungan	7 Dokumen	
					Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	7 Dokumen	
					Jumlah dokumen hasil Pengelolaan pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promasi Kesehatan	8 Dokumen	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promkes	12 Dokumen	
					jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	3 dokumen	
					jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	5 dokumen	
					jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	6 dokumen	
					jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	8 dokumen	Kab. Kampar
					jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	17 Dokumen	
					Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	3 Dokumen	
					"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan"	7 dokumen	
					"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan"	1 Dokumen	
					"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan"	4 Dokumen	
					"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan"	7 Dokumen	

1.02.02.2.02.18  
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

					Promosi Kesehatan"			
					"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan"	8 dokumen		
					"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan"	9 Dokumen		
					"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan"	9 DOKUMEN		
					"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan"	10 dokumen		
					"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan"	80 dokumen		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 dokumen		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3 Dokumen		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	7 dokumen		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	7 Dokumen		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	25 Dokumen		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5 Dokumen		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	10 Dokumen		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	10 Dokumen		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	18 Dokumen		
					jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	18 dokumen		
				1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	0 Dokumen		Kab. Kampar
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kesehatan	5 Dokumen		
					jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	6 dokumen		
					jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	5 dokumen		
					jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	8 dokumen		
					jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	17 Dokumen		
				1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	84 Dokumen		Kab. Kampar
					Jumlah Dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	2 Dokumen		
					Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 dokumen		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	18 Dokumen		
					Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan surveilans kesehatan	1 Dokumen		
					"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan"	1 Dokumen		

					"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan"	4 Dokumen		
					"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan"	7 Dokumen		
					"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan"	8 dokumen		
					"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan"	8 Dokumen		
					"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan"	9 DOKUMEN		
					"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan"	24 dokumen		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 dokumen		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 Dokumen		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7 dokumen		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9 Dokumen		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4 Dokumen		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5 Dokumen		
					jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehtan	10 dokumen		
					jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	3 dokumen		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Survelans Kesehatan	3 Dokumen		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Survelans Kesehatan	4 Dokumen		
					Terlaksananya surveilens dengan baik	7 dok		
				1.02.02.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang		
				1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang		
				1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus"	4 Dokumen	Kab. Kampar	
				1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan penyakit tidak menular	36 Dokumen		
					jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	5 dokumen		
					jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	6 dokumen		
					jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	8 dokumen		
					jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	10 dokumen	Kab. Kampar	
					jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	17 Dokumen		
					Jumlah Dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	2 Dokumen		
					Jumlah Dokumen Hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	14 Dokumen		
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan	1 dokumen		

					Penyakit Menular dan Tidak Menular		
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 dokumen	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3 Dokumen	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4 Dokumen	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	7 dokumen	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	7 Dokumen	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8 dokumen	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8 Dokumen	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	9 Dokumen	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	9 DOKUMEN	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	15 dokumen	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2000 Orang	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5 Dokumen	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5 Dokumen	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8 Dokumen	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	18 Dokumen	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4 Dokumen	
					Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	3 dokumen	
					"Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus"	7 Dokumen	
					Terlaksananya pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	7 Dokumen	
				1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	31 Dokumen	Kab. Kampar
				1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	Kab. Kampar
				1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	5 dokumen 12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Kampar

					Jumlah Dokumen Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya 16 Dokumen		
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan lainnya 18 Dokumen		
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 2 Dokumen		
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 4 Dokumen		
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 9 Dokumen		
					jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya 10 dokumen		
					jumlah dokumen operasional pelayanan kesehatan 6 dokumen		
					jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas 7 dokumen		
					jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas 10 dokumen		
					jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas 17 Dokumen		
					"Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas" 1 Dokumen		
					"Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas" 4 Dokumen		
					"Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas" 8 dokumen		
					"Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas" 9 DOKUMEN		
					"Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas" 500 Dokumen		
					"Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas" 1100 Orang		
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 2 dokumen		
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 2 Dokumen		
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 3 Dokumen		
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 7 dokumen		
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen		
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 DOKUMEN		
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 10 Dokumen		
					jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas 8 dokumen		
					Jumlah Keluarga yang Sudah di Kunjungi di Intervensi Maslah Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas Terlaksananya fungsi manajemen puskesmas atau operasional pelayanan puskesmas 16765 Keluarga		
					jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya 3 orang		
				1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	"Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya" 8 dokumen		Kab. Kampar
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 2 Dokumen		
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12 Dokumen		
				1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	"Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota" 21 Puskesmas		Kab. Kampar
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 1 Unit		
				1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah 3 dokumen		
					jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah 5 dokumen		
					jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah 8 dokumen		Kab. Kampar
					jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah 17 Dokumen		
					Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Kewaspadaan 18 Dokumen		

					<p>Dini dan Respon Wabah</p> <p>Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah 1 Dokumen</p> <p>"Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah" 1 dokumen</p> <p>"Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah" 4 Dokumen</p> <p>"Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah" 7 Dokumen</p> <p>"Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah" 8 dokumen</p> <p>"Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah" 8 Dokumen</p> <p>"Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah" 9 DOKUMEN</p> <p>"Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah" 10 dokumen</p> <p>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 2 dokumen</p> <p>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 3 Dokumen</p> <p>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 7 dokumen</p> <p>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 1 Dokume</p> <p>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 2 Dokumen</p> <p>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 4 Dokumen</p> <p>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 9 Dokumen</p> <p>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Dan Respon Wabah 4 Dokumen</p> <p>jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan dini dan Wabah 7 Dokumen</p> <p>Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah melakukan kewaspadaan dini terhadap kemungkinan terjadinya wabah penyakit 1584 orang</p> <p>Terlaksananya kewaspadaaan dini dan respon wabah 7 Dokumen</p>		
				1.02.02.2.02.38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	<p>Jumlah Public Safety Center (PSC 119 ) Tersedia,Teknologi dan terintegritas dengan rumah sakit dalam satu sistem penanganan gawatdarurat terpadu (SPGDT) 1 unit</p>	Kab. Kampar	
				1.02.02.2.02.39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	<p>Jumlah keluarga yang dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan Puskesmas 3289 Keluarga</p> <p>Jumlah keluarga yang dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan Puskesmas jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas 3604 Keluarga</p> <p>jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas 1100 Keluarga</p> <p>jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas 1600 keluarga</p> <p>jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas 2220 Keluarga</p> <p>jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas 4699 keluarga</p> <p>jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas 5000 keluarga</p> <p>Jumlah Keluarga yang sudah di kunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas 5235 Keluarga</p> <p>Jumlah Keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi 13894 Kelurga</p>	Kab. Kampar	

					<p>masalah kesehatan nya oleh tenaga kesehatan puskesmas</p> <p>"Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas" 250 Orang</p> <p>"Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas" 600 Keluarga</p> <p>"Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas" 4525 Keluarga</p> <p>"Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas" 5078 keluarga</p> <p>"Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas" 5883 keluarga</p> <p>"Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas" 8604 Keluarga</p> <p>"Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas" 8717 keluarga</p> <p>"Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas" 8800 dokumen</p> <p>"Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas" 9880 KELUARGA</p> <p>Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 40 Keluarga</p> <p>Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 2000 Keluarga</p> <p>Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 17987 keluarga</p> <p>Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 0 Keluarga</p> <p>Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi Dan Di Intervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 2000 Keluarga</p> <p>jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatan oleh tenaga kesehatan puskesmas 6353 keluarga</p> <p>Jumlah yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas 5700 Keluarga</p> <p>pis-pk 7 dokumen</p> <p>Terlaksananya pendekatan keluarga yang diawali tahapan kunjungan keluarga 11127 Keluarga</p>		
				1.02.02.2.02.40	jumlah orang terduga menderit tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar 43 orang	Kab. Kampar	
		1.02.02.2.03	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 100 Persen	1.02.02.2.03.01	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 2 Dokumen	Kab. Kampar	
		1.02.02.2.04	Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 100 Persen	1.02.02.2.04.01	Jumlah rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kabupaten/kota yang melakukan peningkatan tata kelola sesuai standar 100 rumah sakit	Kab. Kampar	
					Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya 0 Unit		
				1.02.02.2.04.02	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah 0 Unit	Kab. Kampar	



				Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar Jumlah rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kabupaten/kota yang melakukan peningkatan tata kelola sesuai standar 100 rumah sakit		
				1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan 5 unit	Kab. Kampar	
				1.02.02.2.04.04 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 0 Dokumen Jumlah Hasil Penyiapan Perumusan dan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 10 Dokumen	Kab. Kampar	
<b>1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	cakupan pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan 100 Persen	1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan 100 Persen	1.02.03.2.01.01 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 1 Dokumen	Kab. Kampar	
				1.02.03.2.01.02 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 50 Dokumen	Kab. Kampar	
		1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya perencanaan dan kebutuhan pendayagunaan sumber daya manusia Kesehatan dalam UKM dan UKP 100 Persen Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 12 %	1.02.03.2.02.01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 31 dokumen	Kab. Kampar	
				1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) 90 orang "Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)" 536 Orang Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 292 Orang	Kab. Kampar	

## BAB IV.

### PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN.

#### 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

APBD tahun 2023 disusun berdasarkan urusan pemerintah, program, kegiatan dan sub kegiatan. Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintah berdasarkan urusan pemerintah, program, kegiatan dan sub kegiatan tercantum pada table sebagai berikut berikut:

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1	2	3	4
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH dan program/kegiatan</b>	<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
	<b>1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
<b>1.01</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>518.089.036.235</b>	
<b>1.01.2.19.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	<b>518.089.036.235</b>	
<b>1.01.2.19.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	<b>518.089.036.235</b>	
<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>446.186.071.685</b>	
<b>1.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>664.783.400</b>	
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	382.315.700	
1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	95.267.700	
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	187.200.000	
<b>1.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>439.562.348.685</b>	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	439.503.966.785	
1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	38.381.900	
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.000.000	
<b>1.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>249.999.850</b>	
1.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	249.999.850	
<b>1.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.322.266.786</b>	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	84.996.000	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.058.000	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59.117.186	
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	45.000.000	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	336.204.000	
1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	646.891.600	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>1.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4.136.777.900</b>	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	369.032.460	
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	535.167.000	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.232.578.440	
<b>1.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>249.895.064</b>	
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	249.895.064	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>71.343.960.300</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>41.656.140.351</b>	
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	2.660.363.850	
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7.921.195.600	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	2.003.166.950	
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	2.146.037.250	
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	249.999.700	
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	489.999.800	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	229.052.000	
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	137.007.400	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	310.919.100	
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	24.875.448.751	
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	394.740.600	
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	173.059.750	
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	65.149.600	
<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>26.710.060.299</b>	
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	1.316.615.850	
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.017.734.750	
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	249.999.700	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	159.999.800	
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	268.993.150	
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	336.416.800	
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	22.043.614.999	
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	261.685.500	
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	54.999.750	
<b>1.01.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>2.159.349.700</b>	
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	35.000.000	
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	317.869.000	
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	217.483.350	
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.382.997.000	
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	116.000.450	
1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	89.999.900	
<b>1.01.02.2.04</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>818.409.950</b>	
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	199.982.700	
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	121.385.050	
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	252.063.500	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	94.978.850	
1.01.02.2.04.22	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	149.999.850	
<b>1.01.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	<b>434.114.450</b>	
<b>1.01.03.2.01</b>	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>	<b>279.999.750</b>	
1.01.03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	139.999.750	
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	140.000.000	
<b>1.01.03.2.02</b>	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</b>	<b>154.114.700</b>	
1.01.03.2.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	154.114.700	
<b>1.01.04</b>	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>124.889.800</b>	
<b>1.01.04.2.01</b>	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>124.889.800</b>	
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	74.990.800	
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	49.899.000	
<b>1.02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	<b>320.352.673.588</b>	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>	<b>194.480.849.760</b>	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>	<b>165.435.498.325</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>130.346.368.465</b>	
<b>1.02.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>556.209.300</b>	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	322.752.000	
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	53.931.000	
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	47.900.000	
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.134.000	
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	123.492.300	
<b>1.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>119.652.414.307</b>	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	119.544.429.307	
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	107.985.000	
<b>1.02.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>35.398.000</b>	
1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35.398.000	
<b>1.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>491.320.700</b>	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.034.000	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.389.200	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.535.000	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.694.500	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330.668.000	
<b>1.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>6.670.518.200</b>	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	325.014.200	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.345.504.000	
<b>1.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.940.507.958</b>	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.543.058	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	105.610.000	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.900.000	
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.766.454.900	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>26.239.151.010</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>11.171.138.650</b>	
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	4.805.695.500	
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	2.043.398.600	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	512.963.250	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	20.765.000	
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	30.000.000	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	2.521.311.000	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.237.005.300	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>14.556.077.260</b>	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	20.651.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.108.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	17.385.950	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.197.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	45.682.300	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	26.420.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	18.715.950	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	48.500.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	48.985.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	22.514.900	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.332.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	11.194.900	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	14.910.400	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	33.522.100	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	7.420.550	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	40.318.850	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5.172.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	21.004.000	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	56.582.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	115.289.200	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12.070.933.760	
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	12.291.000	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.200.000.000	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	219.991.700	
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	483.954.700	
<b>1.02.02.2.03</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	<b>471.877.000</b>	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	471.877.000	
<b>1.02.02.2.04</b>	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>40.058.100</b>	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	40.058.100	
<b>1.02.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>8.752.928.000</b>	
<b>1.02.03.2.02</b>	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>8.699.586.000</b>	
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	15.480.000	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	8.672.928.000	
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	11.178.000	
<b>1.02.03.2.03</b>	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>53.342.000</b>	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	53.342.000	
<b>1.02.04</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>19.925.850</b>	
<b>1.02.04.2.04</b>	<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>	<b>19.925.850</b>	
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	19.925.850	
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>77.125.000</b>	
<b>1.02.05.2.01</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>38.580.000</b>	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	38.580.000	
<b>1.02.05.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>16.410.000</b>	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	16.410.000	
<b>1.02.05.2.03</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>22.135.000</b>	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	22.135.000	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0001</b>	<b>UPT PUSKESMAS BANGKINANG</b>	<b>1.682.792.800</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.682.792.800</b>	
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.682.792.800</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.682.792.800	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0002</b>	<b>UPT PUSKESMAS SALO</b>	<b>1.004.700.000</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.004.700.000</b>	
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.004.700.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.004.700.000	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0003</b>	<b>UPT PUSKESMAS LABOY JAYA</b>	<b>1.536.764.978</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.536.764.978</b>	
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.536.764.978</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.536.764.978	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0004</b>	<b>UPT PUSKESMAS KUOK</b>	<b>1.027.883.854</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.027.883.854</b>	
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.027.883.854</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.027.883.854	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.0.00.0.00.01.0005	UPT PUSKESMAS AIR TIRIS	2.117.900.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.117.900.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.117.900.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.117.900.000	
1.02.0.00.0.00.01.0006	UPT PUSKESMAS RUMBIO	886.120.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	886.120.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	886.120.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	886.120.000	
1.02.0.00.0.00.01.0007	UPT PUSKESMAS SAWAH	1.057.596.256	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.057.596.256	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.057.596.256	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.057.596.256	
1.02.0.00.0.00.01.0008	UPT PUSKESMAS KAMPA	743.028.444	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	743.028.444	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	743.028.444	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	743.028.444	
1.02.0.00.0.00.01.0009	UPT PUSKESMAS PETAPANAN	944.600.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	944.600.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	944.600.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	944.600.000	
1.02.0.00.0.00.01.0010	UPT PUSKESMAS PANTAI CERMIN	922.051.332	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	922.051.332	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	922.051.332	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	922.051.332	
1.02.0.00.0.00.01.0011	UPT PUSKESMAS KOTA GARO	1.588.620.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.588.620.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.588.620.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.588.620.000	
1.02.0.00.0.00.01.0012	UPT PUSKESMAS TANAH TINGGI	741.000.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	741.000.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	741.000.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	741.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0013	UPT PUSKESMAS SUKA RAMAI	871.438.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	871.438.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	871.438.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	871.438.000	
1.02.0.00.0.00.01.0014	UPT PUSKESMAS SINAMA NENEK	433.580.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	433.580.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	433.580.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	433.580.000	
1.02.0.00.0.00.01.0015	UPT PUSKESMAS BATU BERSURAT	668.139.060	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	668.139.060	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	668.139.060	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	668.139.060	
1.02.0.00.0.00.01.0016	UPT PUSKESMAS PUSK GUNUNG BUNGSU	284.910.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	284.910.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	284.910.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	284.910.000	
1.02.0.00.0.00.01.0017	UPT PUSKESMAS PULAU GADANG	418.068.780	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	418.068.780	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	418.068.780	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	418.068.780	
1.02.0.00.0.00.01.0018	<b>UPT PUSKESMAS LIPAT KAIN</b>	<b>1.579.891.641</b>	
1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.579.891.641</b>	
1.02.01.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.579.891.641</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.579.891.641	
1.02.0.00.0.00.01.0019	<b>UPT PUSKESMAS SUNGAI PAGAR</b>	<b>471.650.000</b>	
1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>471.650.000</b>	
1.02.01.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>471.650.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	471.650.000	
1.02.0.00.0.00.01.0020	<b>UPT PUSKESMAS GEMA</b>	<b>450.164.400</b>	
1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>450.164.400</b>	
1.02.01.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>450.164.400</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	450.164.400	
1.02.0.00.0.00.01.0021	<b>UPT PUSKESMAS BATU SASAK</b>	<b>376.352.958</b>	
1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>376.352.958</b>	
1.02.01.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>376.352.958</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	376.352.958	
1.02.0.00.0.00.01.0022	<b>UPT PUSKESMAS SIMALINYANG</b>	<b>1.001.880.000</b>	
1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.001.880.000</b>	
1.02.01.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.001.880.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.001.880.000	
1.02.0.00.0.00.01.0023	<b>PUSKESMAS GUNUNG SAHILAN</b>	<b>428.580.000</b>	
1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>428.580.000</b>	
1.02.01.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>428.580.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	428.580.000	
1.02.0.00.0.00.01.0024	<b>UPT PUSKESMAS GUNUNG SARI</b>	<b>436.000.000</b>	
1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>436.000.000</b>	
1.02.01.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>436.000.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	436.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0025	<b>UPT PUSKESMAS PANDAU JAYA</b>	<b>1.070.400.000</b>	
1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.070.400.000</b>	
1.02.01.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.070.400.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.070.400.000	
1.02.0.00.0.00.01.0026	<b>UPT PUSKESMAS KUBANG JAYA</b>	<b>1.017.944.316</b>	
1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.017.944.316</b>	
1.02.01.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.017.944.316</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.017.944.316	
1.02.0.00.0.00.01.0027	<b>UPT PUSKESMAS PANGKALAN BARU</b>	<b>626.292.000</b>	
1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>626.292.000</b>	
1.02.01.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>626.292.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	626.292.000	
1.02.0.00.0.00.01.0028	<b>UPT PUSKESMAS TAMBANG</b>	<b>1.697.200.000</b>	
1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.697.200.000</b>	
1.02.01.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.697.200.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.697.200.000	
1.02.0.00.0.00.01.0029	<b>UPT PUSKESMAS PANTAI RAJA</b>	<b>857.160.000</b>	
1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>857.160.000</b>	
1.02.01.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>857.160.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	857.160.000	
1.02.0.00.0.00.01.0030	<b>UPT PUSKESMAS SIBERUANG</b>	<b>960.651.452</b>	
1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>960.651.452</b>	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>960.651.452</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	960.651.452	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0031</b>	<b>UPT PUSKESMAS TAPUNG</b>	<b>833.997.314</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>833.997.314</b>	
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>833.997.314</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	833.997.314	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0032</b>	<b>UPT INSTALASI FARMASI DAN LOGISTIK</b>	<b>159.996.400</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>159.996.400</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>159.996.400</b>	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	159.996.400	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0033</b>	<b>UPTD INSTALASI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH</b>	<b>147.997.450</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>147.997.450</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>147.997.450</b>	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	147.997.450	
<b>1.02.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</b>	<b>125.871.823.828</b>	
<b>1.02.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</b>	<b>125.871.823.828</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>104.726.053.331</b>	
<b>1.02.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>52.000.000</b>	
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13.000.000	
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	13.000.000	
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.000.000	
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	13.000.000	
<b>1.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>38.537.641.297</b>	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38.524.641.297	
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.000.000	
<b>1.02.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>395.900.000</b>	
1.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100.000.000	
1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	295.900.000	
<b>1.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2.583.888.550</b>	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	299.999.000	
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	583.991.000	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	599.975.550	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	499.991.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	499.932.000	
<b>1.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>300.000.000</b>	
1.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300.000.000	
<b>1.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>9.656.623.484</b>	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.799.995.000	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.856.628.484	
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>53.200.000.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	53.200.000.000	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>8.094.501.845</b>	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>7.394.501.845</b>	
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	999.993.000	
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	4.645.121.945	
1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	499.388.800	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	500.000.000	
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	250.000.000	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	499.998.100	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>700.000.000</b>	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100.000.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100.000.000	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	500.000.000	
<b>1.02.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>13.051.268.652</b>	
<b>1.02.03.2.02</b>	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>13.051.268.652</b>	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	13.051.268.652	
<b>1.03</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>160.838.609.090</b>	
<b>1.03.2.10.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>160.838.609.090</b>	
<b>1.03.2.10.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>160.838.609.090</b>	
<b>1.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>15.853.658.055</b>	
<b>1.03.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>441.273.350</b>	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	215.743.350	
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	66.080.000	
1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.448.000	
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	81.852.000	
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.150.000	
<b>1.03.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>10.739.445.505</b>	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.680.410.505	
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	59.035.000	
<b>1.03.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>926.177.000</b>	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.360.000	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	88.164.000	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	61.993.000	
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	29.040.000	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	731.620.000	
<b>1.03.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>710.000.000</b>	
1.03.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	710.000.000	
<b>1.03.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.103.304.000</b>	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	258.338.000	
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.700.000	
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	811.266.000	
<b>1.03.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.933.458.200</b>	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	167.455.800	
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	363.332.400	
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	1.327.670.000	
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000	
<b>1.03.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>6.523.825.600</b>	
<b>1.03.02.2.02</b>	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>6.523.825.600</b>	
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	325.589.000	
1.03.02.2.02.15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	4.433.060.000	
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.416.966.200	
1.03.02.2.02.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	348.210.400	
<b>1.03.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>4.698.892.000</b>	
<b>1.03.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4.698.892.000</b>	
1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	203.600.000	
1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	528.080.000	
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	3.967.212.000	
<b>1.03.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>3.291.866.000</b>	
<b>1.03.05.2.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.291.866.000</b>	
1.03.05.2.01.03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	3.291.866.000	
<b>1.03.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>7.806.259.500</b>	
<b>1.03.06.2.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>7.806.259.500</b>	
1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	113.390.000	
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	6.671.632.500	
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	1.021.237.000	
<b>1.03.08</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>25.975.674.899</b>	
<b>1.03.08.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>25.975.674.899</b>	
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	633.500.000	
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	10.358.536.250	
1.03.08.2.01.03	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	200.249.000	
1.03.08.2.01.09	Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	200.260.000	
1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	14.356.081.649	
1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	227.048.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>1.03.10</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>95.934.387.236</b>	
<b>1.03.10.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>95.934.387.236</b>	
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	713.700.000	
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	573.810.000	
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	50.083.250.500	
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	10.009.356.736	
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	2.376.000.000	
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	2.138.400.000	
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.051.600.000	
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	26.207.145.000	
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	741.125.000	
1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	2.040.000.000	
<b>1.03.12</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>754.045.800</b>	
<b>1.03.12.2.01</b>	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>587.777.400</b>	
1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	587.777.400	
<b>1.03.12.2.03</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>158.862.400</b>	
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	158.862.400	
<b>1.03.12.2.04</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>7.406.000</b>	
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	7.406.000	
<b>1.04</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>37.726.540.769</b>	
<b>1.04.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN</b>	<b>37.726.540.769</b>	
<b>1.04.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN</b>	<b>37.726.540.769</b>	
<b>1.04.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8.334.220.286</b>	
<b>1.04.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>593.550.600</b>	
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	364.016.000	
1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	80.376.000	
1.04.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	38.666.000	
1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	32.914.600	
1.04.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	14.500.000	
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	63.078.000	
<b>1.04.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.013.089.083</b>	
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.959.961.083	
1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.656.000	
1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	35.472.000	
<b>1.04.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>204.350.000</b>	
1.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	46.410.000	
1.04.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	28.840.000	
1.04.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.120.000	
1.04.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	68.980.000	
<b>1.04.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>861.823.103</b>	
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.965.000	
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	264.876.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.235.000	
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.689.103	
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.280.000	
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	507.778.000	
<b>1.04.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>305.512.000</b>	
1.04.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	105.000.000	
1.04.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.512.000	
<b>1.04.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>892.047.500</b>	
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.846.500	
1.04.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.616.000	
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	793.585.000	
<b>1.04.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>463.848.000</b>	
1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	163.920.000	
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	119.328.000	
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	180.600.000	
<b>1.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>1.766.845.800</b>	
<b>1.04.02.2.01</b>	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>224.999.800</b>	
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	89.999.800	
1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	90.000.000	
1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	45.000.000	
<b>1.04.02.2.03</b>	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>1.088.845.700</b>	
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	94.500.000	
1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	94.345.700	
1.04.02.2.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	900.000.000	
<b>1.04.02.2.06</b>	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>	<b>453.000.300</b>	
1.04.02.2.06.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	153.000.000	
1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	300.000.300	
<b>1.04.03</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>759.058.000</b>	
<b>1.04.03.2.01</b>	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>	<b>309.394.000</b>	
1.04.03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	248.170.000	
1.04.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	61.224.000	
<b>1.04.03.2.02</b>	<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	<b>213.177.000</b>	
1.04.03.2.02.08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	213.177.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>1.04.03.2.03</b>	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	<b>236.487.000</b>	
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	236.487.000	
<b>1.04.04</b>	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>11.150.000.200</b>	
<b>1.04.04.2.01</b>	<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>11.150.000.200</b>	
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	11.150.000.200	
<b>1.04.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>15.487.547.383</b>	
<b>1.04.05.2.01</b>	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>15.487.547.383</b>	
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	231.782.050	
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	14.758.005.533	
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	85.871.000	
1.04.05.2.01.04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	411.888.800	
<b>1.04.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>228.869.100</b>	
<b>1.04.06.2.01</b>	<b>Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil</b>	<b>228.869.100</b>	
1.04.06.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	228.869.100	
<b>1.05</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>50.059.430.477</b>	
<b>1.05.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA</b>	<b>14.986.071.215</b>	
<b>1.05.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA</b>	<b>14.986.071.215</b>	
<b>1.05.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>13.121.434.515</b>	
<b>1.05.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>3.499.400</b>	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.499.400	
<b>1.05.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.801.604.986</b>	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.798.105.586	
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.499.400	
<b>1.05.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>30.000.000</b>	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30.000.000	
<b>1.05.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>799.656.300</b>	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.571.000	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.760.800	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	301.804.000	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.522.500	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.480.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	399.518.000	
<b>1.05.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>7.881.952.404</b>	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.346.800	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.851.605.604	
<b>1.05.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>604.721.425</b>	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	99.236.975	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	468.706.650	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.777.800	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	
<b>1.05.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>1.864.636.700</b>	
<b>1.05.02.2.01</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.864.636.700</b>	
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	827.780.300	
1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	685.275.000	
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	136.581.600	
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	199.999.800	
1.05.02.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	15.000.000	
<b>1.05.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	<b>16.380.892.674</b>	
<b>1.05.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	<b>16.380.892.674</b>	
<b>1.05.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8.478.318.359</b>	
<b>1.05.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>156.005.000</b>	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	95.801.000	
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	37.011.000	
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.731.000	
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.731.000	
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.731.000	
<b>1.05.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.882.361.015</b>	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.880.993.215	
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.367.800	
<b>1.05.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>147.048.000</b>	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	147.048.000	
<b>1.05.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.194.776.150</b>	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.481.000	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	127.549.750	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.820.000	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.312.400	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.600.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	973.013.000	
<b>1.05.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>314.865.000</b>	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	314.865.000	
<b>1.05.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.934.425.294</b>	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	167.982.000	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.766.443.294	
<b>1.05.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>848.837.900</b>	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	559.405.000	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	214.432.900	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000	
<b>1.05.03</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>7.902.574.315</b>	
<b>1.05.03.2.01</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>621.216.600</b>	
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	521.968.000	
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	99.248.600	
<b>1.05.03.2.02</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>6.127.210.365</b>	
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	422.483.600	
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	5.704.726.765	
<b>1.05.03.2.03</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>1.040.671.000</b>	
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	301.792.000	
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	321.532.000	
1.05.03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	417.347.000	
<b>1.05.03.2.04</b>	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>113.476.350</b>	
1.05.03.2.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	113.476.350	
<b>1.05.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN</b>	<b>18.692.466.588</b>	
<b>1.05.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN</b>	<b>18.692.466.588</b>	
<b>1.05.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>17.024.091.278</b>	
<b>1.05.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>870.186.780</b>	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	613.168.000	
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25.950.000	
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	18.153.970	
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20.417.250	
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	20.232.450	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	126.235.660	
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.029.450	
<b>1.05.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.279.640.380</b>	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.249.874.380	
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.850.000	
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.084.000	
1.05.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	9.832.000	
<b>1.05.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>11.583.960</b>	
1.05.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.583.960	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>1.05.01.2.04</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.974.000</b>	
1.05.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1.974.000	
<b>1.05.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>347.882.780</b>	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	319.914.210	
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.315.350	
1.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25.653.220	
<b>1.05.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.246.765.340</b>	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	52.897.680	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	193.566.580	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	449.180.000	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	166.941.780	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000	
1.05.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	14.179.300	
<b>1.05.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>466.073.220</b>	
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	115.067.040	
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	179.577.780	
1.05.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	171.428.400	
<b>1.05.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>7.688.176.018</b>	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.400.000	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.029.120	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.614.746.898	
<b>1.05.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.111.808.800</b>	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	146.363.900	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.751.743.300	
1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	5.061.600	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.880.000	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	175.000.000	
1.05.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.760.000	
<b>1.05.04</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>1.668.375.310</b>	
<b>1.05.04.2.01</b>	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.058.178.510</b>	
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	40.000.000	
1.05.04.2.01.04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	
1.05.04.2.01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	40.001.650	
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	540.000.260	
1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	240.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.04.2.01.08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	38.176.600	
1.05.04.2.01.10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	40.000.000	
<b>1.05.04.2.02</b>	<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	<b>80.000.000</b>	
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	40.000.000	
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	40.000.000	
<b>1.05.04.2.03</b>	<b>Investigasi Kejadian Kebakaran</b>	<b>40.000.000</b>	
1.05.04.2.03.01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	40.000.000	
<b>1.05.04.2.04</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	<b>320.000.000</b>	
1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	280.000.000	
1.05.04.2.04.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	40.000.000	
<b>1.05.04.2.05</b>	<b>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>	<b>170.196.800</b>	
1.05.04.2.05.01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	40.000.000	
1.05.04.2.05.02	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	40.196.660	
1.05.04.2.05.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	50.000.140	
1.05.04.2.05.04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	40.000.000	
<b>1.06</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>	<b>14.458.087.903</b>	
<b>1.06.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	<b>14.458.087.903</b>	
<b>1.06.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	<b>14.458.087.903</b>	
<b>1.06.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>7.875.827.593</b>	
<b>1.06.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>505.472.250</b>	
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	424.327.800	
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.504.300	
1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	13.168.000	
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.390.000	
1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.394.650	
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.388.000	
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.299.500	
<b>1.06.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.562.500.293</b>	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.545.404.293	
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.096.000	
<b>1.06.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>84.932.000</b>	
1.06.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	44.472.000	
1.06.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40.460.000	
<b>1.06.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>562.206.850</b>	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.527.200	
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	197.046.100	
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.720.000	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.499.550	
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.650.000	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	242.764.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>1.06.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>979.268.000</b>	
1.06.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	335.000.000	
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	172.974.000	
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.294.000	
1.06.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	430.000.000	
<b>1.06.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.092.855.000</b>	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	154.185.000	
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	938.670.000	
<b>1.06.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.088.593.200</b>	
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	121.821.200	
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	381.412.000	
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.350.000	
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	548.010.000	
<b>1.06.02</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>2.611.513.650</b>	
<b>1.06.02.2.03</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.611.513.650</b>	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	539.237.300	
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	258.450.000	
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	905.179.700	
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	908.646.650	
<b>1.06.04</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>1.447.041.400</b>	
<b>1.06.04.2.01</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>1.107.426.900</b>	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	20.000.000	
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	20.000.000	
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	354.952.000	
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	310.592.500	
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	401.882.400	
<b>1.06.04.2.02</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>339.614.500</b>	
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	339.614.500	
<b>1.06.05</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>945.440.660</b>	
<b>1.06.05.2.02</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>945.440.660</b>	
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	149.679.800	
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	239.995.060	
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	555.765.800	
<b>1.06.06</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>745.250.000</b>	
<b>1.06.06.2.01</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>195.000.000</b>	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	25.000.000	
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	25.000.000	
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	145.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>1.06.06.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>550.250.000</b>	
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	65.000.000	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	485.250.000	
<b>1.06.07</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>833.014.600</b>	
<b>1.06.07.2.01</b>	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>833.014.600</b>	
1.06.07.2.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	397.480.000	
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	365.214.600	
1.06.07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	70.320.000	
	<b>2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
<b>2.07</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>	<b>1.806.890.430</b>	
<b>2.07.3.31.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA</b>	<b>1.806.890.430</b>	
<b>2.07.3.31.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA</b>	<b>1.806.890.430</b>	
<b>2.07.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	<b>289.763.780</b>	
<b>2.07.02.2.01</b>	<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	<b>289.763.780</b>	
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	265.763.780	
2.07.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	24.000.000	
<b>2.07.03</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>372.000.000</b>	
<b>2.07.03.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>266.250.000</b>	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	240.000.000	
2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	26.250.000	
<b>2.07.03.2.02</b>	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>24.000.000</b>	
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	24.000.000	
<b>2.07.03.2.03</b>	<b>Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</b>	<b>24.000.000</b>	
2.07.03.2.03.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	24.000.000	
<b>2.07.03.2.04</b>	<b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>	<b>24.000.000</b>	
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	24.000.000	
<b>2.07.03.2.05</b>	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>33.750.000</b>	
2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	33.750.000	
<b>2.07.04</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>391.392.000</b>	
<b>2.07.04.2.01</b>	<b>Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>236.000.000</b>	
2.07.04.2.01.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	88.000.000	
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	28.000.000	
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	24.000.000	
2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	16.000.000	
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	80.000.000	
<b>2.07.04.2.02</b>	<b>Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>24.000.000</b>	
2.07.04.2.02.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	20.000.000	
2.07.04.2.02.02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	4.000.000	
<b>2.07.04.2.03</b>	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>79.392.000</b>	
2.07.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	55.392.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	24.000.000	
<b>2.07.04.2.04</b>	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>52.000.000</b>	
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	20.000.000	
2.07.04.2.04.02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	20.000.000	
2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	12.000.000	
<b>2.07.05</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>753.734.650</b>	
<b>2.07.05.2.01</b>	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>375.001.600</b>	
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	119.999.800	
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	65.002.000	
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	189.999.800	
<b>2.07.05.2.02</b>	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>378.733.050</b>	
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	107.685.700	
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	116.113.750	
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	75.966.800	
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	35.556.900	
2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	43.409.900	
<b>2.08</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>4.208.251.150</b>	
<b>2.14.2.08.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>4.208.251.150</b>	
<b>2.14.2.08.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>4.208.251.150</b>	
<b>2.08.02</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>312.000.600</b>	
<b>2.08.02.2.01</b>	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>40.000.800</b>	
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	40.000.800	
<b>2.08.02.2.02</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>79.999.900</b>	
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	79.999.900	
<b>2.08.02.2.03</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>191.999.900</b>	
2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	71.999.900	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	120.000.000	
<b>2.08.03</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>100.000.000</b>	
<b>2.08.03.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>100.000.000</b>	
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	
<b>2.08.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>2.508.000.650</b>	
<b>2.08.04.2.01</b>	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>120.000.200</b>	
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	120.000.200	
<b>2.08.04.2.02</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.388.000.450</b>	
2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	88.000.200	
2.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.300.000.250	
<b>2.08.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>75.321.450</b>	
<b>2.08.05.2.01</b>	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>75.321.450</b>	
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	75.321.450	
<b>2.08.06</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>761.316.500</b>	
<b>2.08.06.2.01</b>	<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>61.283.000</b>	
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	61.283.000	
<b>2.08.06.2.02</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>700.033.500</b>	
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	540.002.500	
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	160.031.000	
<b>2.08.07</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>451.611.950</b>	
<b>2.08.07.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>109.999.950</b>	
2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	109.999.950	
<b>2.08.07.2.03</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>341.612.000</b>	
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	341.612.000	
<b>2.09</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>	<b>6.481.644.055</b>	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.09.0.00.0.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN	6.481.644.055	
2.09.0.00.0.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN	6.481.644.055	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.244.216.329	
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	155.164.200	
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.502.000	
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.662.200	
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.760.682.310	
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.750.796.890	
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.885.420	
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	527.751.950	
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.575.000	
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	231.221.700	
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.208.000	
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.074.250	
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.764.000	
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	227.909.000	
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	432.247.464	
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.800.000	
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	412.447.464	
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	368.370.405	
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.988.895	
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.931.510	
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.450.000	
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	235.000.000	
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	543.697.366	
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	543.697.366	
2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	543.697.366	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.469.428.810	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	528.432.000	
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	289.187.000	
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	239.245.000	
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	106.790.050	
2.09.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	39.659.050	
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	67.131.000	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	834.206.760	
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	274.197.500	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	560.009.260	
<b>2.09.04</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>79.999.950</b>	
<b>2.09.04.2.01</b>	<b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>	<b>79.999.950</b>	
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	79.999.950	
<b>2.09.05</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>144.301.600</b>	
<b>2.09.05.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>144.301.600</b>	
2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	144.301.600	
<b>2.10</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>	<b>115.043.200</b>	
<b>1.03.2.10.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>115.043.200</b>	
<b>1.03.2.10.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>115.043.200</b>	
<b>2.10.08</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>	<b>89.708.400</b>	
<b>2.10.08.2.02</b>	<b>Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong</b>	<b>89.708.400</b>	
2.10.08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	89.708.400	
<b>2.10.09</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>	<b>25.334.800</b>	
<b>2.10.09.2.01</b>	<b>Penerbitan Izin Membuka Tanah</b>	<b>25.334.800</b>	
2.10.09.2.01.02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	25.334.800	
<b>2.11</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>19.301.954.401</b>	
<b>2.11.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>19.301.954.401</b>	
<b>2.11.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>19.301.954.401</b>	
<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>15.089.857.351</b>	
<b>2.11.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>22.449.900</b>	
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.999.950	
2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	490.000	
2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	490.000	
2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	490.000	
2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	490.000	
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	490.000	
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.999.950	
<b>2.11.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.734.978.972</b>	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.733.979.022	
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	999.950	
<b>2.11.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>372.802.395</b>	
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.144.000	
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	211.967.700	
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.044.000	
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.125.000	
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.929.695	
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	103.592.000	
<b>2.11.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>9.892.906.084</b>	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	264.763.395	
2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.150.000	
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.624.992.689	
<b>2.11.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>66.720.000</b>	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.720.000	
<b>2.11.03</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>400.000.000</b>	
<b>2.11.03.2.02</b>	<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>400.000.000</b>	
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	400.000.000	
<b>2.11.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>415.387.050</b>	
<b>2.11.04.2.01</b>	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>415.387.050</b>	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	415.387.050	
<b>2.11.07</b>	<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	<b>300.000.000</b>	
<b>2.11.07.2.02</b>	<b>Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH</b>	<b>300.000.000</b>	
2.11.07.2.02.01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	300.000.000	
<b>2.11.11</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>3.096.710.000</b>	
<b>2.11.11.2.01</b>	<b>Pengelolaan Sampah</b>	<b>3.096.710.000</b>	
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	150.000.000	
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.296.710.000	
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.650.000.000	
<b>2.12</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>9.524.720.628</b>	
<b>2.12.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>9.524.720.628</b>	
<b>2.12.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>9.524.720.628</b>	
<b>2.12.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>9.521.040.628</b>	
<b>2.12.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>44.877.000</b>	
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.227.000	
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.671.000	
2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.508.000	
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.508.000	
2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.508.000	
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.455.000	
<b>2.12.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.323.303.861</b>	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.291.778.861	
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	31.525.000	
<b>2.12.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>20.272.000</b>	
2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.272.000	
<b>2.12.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>3.871.889.750</b>	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.760.000	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.010.802.000	
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.830.000	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	442.587.750	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	388.910.000	
<b>2.12.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.925.964.341</b>	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	427.422.825	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.498.541.516	
<b>2.12.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>334.733.676</b>	
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	190.837.886	
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.695.790	
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.200.000	
<b>2.12.02</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>1.800.000</b>	
<b>2.12.02.2.01</b>	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>1.200.000</b>	
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.200.000	
<b>2.12.02.2.03</b>	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>600.000</b>	
2.12.02.2.03.03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	600.000	
<b>2.12.03</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>720.000</b>	
<b>2.12.03.2.01</b>	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>720.000</b>	
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	720.000	
<b>2.12.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>600.000</b>	
<b>2.12.04.2.01</b>	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>600.000</b>	
2.12.04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	600.000	
<b>2.12.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>560.000</b>	
<b>2.12.05.2.01</b>	<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>	<b>560.000</b>	
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	560.000	
<b>2.13</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>11.866.602.784</b>	
<b>2.13.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>11.866.602.784</b>	
<b>2.13.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>11.866.602.784</b>	
<b>2.13.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.956.456.484</b>	
<b>2.13.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>281.989.960</b>	
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	159.099.650	
2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.998.000	
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.892.310	
<b>2.13.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.753.001.521</b>	
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.747.372.471	
2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.629.050	
<b>2.13.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>85.252.000</b>	
2.13.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	42.083.000	
2.13.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14.969.000	
2.13.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28.200.000	
<b>2.13.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>925.306.300</b>	
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000	
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	251.123.400	
2.13.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.223.000	
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.770.000	
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59.999.900	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.900.000	
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	442.315.000	
2.13.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	
2.13.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	9.975.000	
<b>2.13.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>58.236.000</b>	
2.13.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	49.336.000	
2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.900.000	
<b>2.13.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>636.646.820</b>	
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.327.000	
2.13.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.928.000	
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	520.391.820	
<b>2.13.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>216.023.883</b>	
2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	151.279.883	
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.754.000	
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.990.000	
<b>2.13.02</b>	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	<b>274.957.000</b>	
<b>2.13.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	<b>274.957.000</b>	
2.13.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	274.957.000	
<b>2.13.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>	<b>199.996.800</b>	
<b>2.13.03.2.01</b>	<b>Fasilitasi Kerja Sama antar Desa</b>	<b>199.996.800</b>	
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	99.996.900	
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	99.999.900	
<b>2.13.04</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>4.955.197.800</b>	
<b>2.13.04.2.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>4.955.197.800</b>	
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	49.000.000	
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	99.992.800	
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	4.178.232.000	
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	149.981.000	
2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	39.950.000	
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	38.413.000	
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	200.689.000	
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	148.991.000	
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	49.949.000	
<b>2.13.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>479.994.700</b>	
<b>2.13.05.2.01</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>479.994.700</b>	
2.13.05.2.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	59.997.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	99.999.900	
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100.000.000	
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	159.998.900	
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	59.998.900	
<b>2.14</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>7.977.417.390</b>	
<b>2.14.2.08.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>7.977.417.390</b>	
<b>2.14.2.08.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>7.977.417.390</b>	
<b>2.14.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.158.020.190</b>	
<b>2.14.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>211.746.560</b>	
2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	131.487.750	
2.14.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.258.810	
<b>2.14.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.044.045.724</b>	
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.044.045.724	
<b>2.14.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>9.400.000</b>	
2.14.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9.400.000	
<b>2.14.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>424.706.950</b>	
2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.452.000	
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.625.700	
2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000	
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.770.750	
2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.533.500	
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	282.325.000	
<b>2.14.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>17.689.000</b>	
2.14.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	17.689.000	
<b>2.14.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.128.552.116</b>	
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	111.648.000	
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.016.904.116	
<b>2.14.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>321.879.840</b>	
2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.569.590	
2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	107.115.250	
2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.015.000	
2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	153.180.000	
<b>2.14.02</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>135.999.850</b>	
<b>2.14.02.2.02</b>	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>135.999.850</b>	
2.14.02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	135.999.850	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>2.14.03</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>753.397.150</b>	
<b>2.14.03.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>236.397.500</b>	
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	79.999.900	
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	119.999.800	
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	36.397.800	
<b>2.14.03.2.03</b>	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>460.999.650</b>	
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	208.762.050	
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	116.238.000	
2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	67.999.800	
2.14.03.2.03.12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	67.999.800	
<b>2.14.03.2.04</b>	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>56.000.000</b>	
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	56.000.000	
<b>2.14.04</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>930.000.200</b>	
<b>2.14.04.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>400.000.000</b>	
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	160.000.000	
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	240.000.000	
<b>2.14.04.2.02</b>	<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>530.000.200</b>	
2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	530.000.200	
<b>2.15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>	<b>33.651.180.356</b>	
<b>2.15.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	<b>33.651.180.356</b>	
<b>2.15.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	<b>33.651.180.356</b>	
<b>2.15.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>9.593.225.621</b>	
<b>2.15.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>165.322.400</b>	
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	96.270.000	
2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	33.450.000	
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.602.400	
<b>2.15.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.078.879.143</b>	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.056.397.743	
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.481.400	
<b>2.15.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>692.310.450</b>	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.902.000	
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	109.962.550	
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.385.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	110.685.900	
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.027.000	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	364.348.000	
<b>2.15.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.774.232.228</b>	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.054.500	
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.703.177.728	
<b>2.15.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>882.481.400</b>	
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	94.676.200	
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	121.418.200	
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	624.201.000	
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.186.000	
<b>2.15.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>24.040.254.735</b>	
<b>2.15.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>22.847.157.235</b>	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	7.591.284.000	
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	15.255.873.235	
<b>2.15.02.2.04</b>	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>37.360.000</b>	
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	37.360.000	
<b>2.15.02.2.05</b>	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>51.510.000</b>	
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12.600.000	
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5.700.000	
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	33.210.000	
<b>2.15.02.2.06</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>595.523.500</b>	
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	556.991.500	
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	38.532.000	
<b>2.15.02.2.07</b>	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>13.080.000</b>	
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	7.830.000	
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	5.250.000	
<b>2.15.02.2.08</b>	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>9.924.000</b>	
2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	9.924.000	
<b>2.15.02.2.09</b>	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>485.700.000</b>	
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	485.700.000	
<b>2.15.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>17.700.000</b>	
<b>2.15.03.2.13</b>	<b>Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau</b>	<b>17.700.000</b>	
2.15.03.2.13.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	17.700.000	
<b>2.16</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>15.609.862.156</b>	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.16.2.21.2.20.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	15.609.862.156	
2.16.2.21.2.20.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	15.609.862.156	
2.16.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8.554.089.456</b>	
2.16.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>382.748.250</b>	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.770.000	
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	81.739.000	
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	220.239.250	
2.16.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.163.104.221</b>	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.138.074.821	
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.029.400	
2.16.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>150.008.000</b>	
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	150.008.000	
2.16.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.432.954.385</b>	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.010.000	
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	461.853.450	
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	199.920.000	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	105.188.935	
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28.512.000	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	606.470.000	
2.16.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.272.811.000</b>	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	330.866.000	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	941.945.000	
2.16.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.152.463.600</b>	
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	195.399.600	
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	281.270.000	
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	130.490.000	
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	545.304.000	
2.16.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>3.805.180.250</b>	
2.16.02.2.01	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.805.180.250</b>	
2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	178.872.000	
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	315.760.000	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.922.873.000	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	269.703.250	
2.16.02.2.01.09	Manajemen Komunikasi Krisis	128.246.000	
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	389.826.000	
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	599.900.000	
2.16.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>3.250.592.450</b>	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>2.16.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.100.790.000</b>	
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	48.290.000	
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3.052.500.000	
<b>2.16.03.2.02</b>	<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>149.802.450</b>	
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	53.845.000	
2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	42.249.950	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	53.707.500	
<b>2.17</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>	<b>8.562.375.691</b>	
<b>3.30.2.17.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL</b>	<b>8.562.375.691</b>	
<b>3.30.2.17.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL</b>	<b>8.562.375.691</b>	
<b>2.17.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>7.048.661.611</b>	
<b>2.17.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>325.266.750</b>	
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	250.266.750	
2.17.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	55.000.000	
2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000	
<b>2.17.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.901.241.131</b>	
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.893.040.131	
2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.201.000	
<b>2.17.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.191.240.000</b>	
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	52.886.000	
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	316.579.000	
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.760.000	
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	103.714.000	
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	628.101.000	
<b>2.17.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>174.372.000</b>	
2.17.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	87.782.000	
2.17.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	86.590.000	
<b>2.17.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>964.641.140</b>	
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.485.940	
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	829.155.200	
<b>2.17.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>491.900.590</b>	
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	225.250.590	
2.17.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	187.416.000	
2.17.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	79.234.000	
<b>2.17.03</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>272.470.200</b>	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.17.03.2.01	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>272.470.200</b>	
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	59.457.400	
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	213.012.800	
<b>2.17.04</b>	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>55.743.580</b>	
2.17.04.2.01	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>55.743.580</b>	
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	55.743.580	
<b>2.17.07</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>1.135.548.300</b>	
2.17.07.2.01	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>1.135.548.300</b>	
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	49.663.000	
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	593.614.400	
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	492.270.900	
<b>2.17.08</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>49.952.000</b>	
2.17.08.2.01	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	<b>49.952.000</b>	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	49.952.000	
<b>2.18</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>	<b>10.297.465.256</b>	
2.18.0.00.0.00.01.0000	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	<b>10.297.465.256</b>	
2.18.0.00.0.00.01.0000	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	<b>10.297.465.256</b>	
<b>2.18.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>9.189.940.756</b>	
2.18.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>139.488.000</b>	
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	103.350.000	
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36.138.000	
2.18.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.755.056.256</b>	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.728.465.256	
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	26.591.000	
2.18.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>127.784.000</b>	
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	43.140.000	
2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	84.644.000	
2.18.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.048.556.100</b>	
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.446.000	
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	181.515.000	
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	173.319.000	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	67.970.100	
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.600.000	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	609.706.000	
2.18.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.849.716.400</b>	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	174.238.560	
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.675.477.840	
<b>2.18.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>269.340.000</b>	
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	242.960.000	
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.380.000	
<b>2.18.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>116.292.000</b>	
<b>2.18.02.2.02</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>116.292.000</b>	
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	116.292.000	
<b>2.18.04</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>765.851.500</b>	
<b>2.18.04.2.01</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>765.851.500</b>	
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	256.530.000	
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	176.540.000	
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	332.781.500	
<b>2.18.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>225.381.000</b>	
<b>2.18.06.2.01</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>225.381.000</b>	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	225.381.000	
<b>2.19</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	<b>3.024.191.900</b>	
<b>1.01.2.19.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	<b>3.024.191.900</b>	
<b>1.01.2.19.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	<b>3.024.191.900</b>	
<b>2.19.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	<b>149.999.750</b>	
<b>2.19.02.2.01</b>	<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	<b>149.999.750</b>	
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	149.999.750	
<b>2.19.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>2.739.192.200</b>	
<b>2.19.03.2.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.679.959.700</b>	
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	1.679.959.700	
<b>2.19.03.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>359.999.050</b>	
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	359.999.050	
<b>2.19.03.2.03</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>38.815.400</b>	
2.19.03.2.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	38.815.400	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>2.19.03.2.05</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	<b>660.418.050</b>	
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	417.397.800	
2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	243.020.250	
<b>2.19.04</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	<b>134.999.950</b>	
<b>2.19.04.2.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>	<b>134.999.950</b>	
2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	134.999.950	
<b>2.20</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>	<b>90.589.000</b>	
<b>2.16.2.21.2.20.01.0000</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN</b>	<b>90.589.000</b>	
<b>2.16.2.21.2.20.01.0000</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN</b>	<b>90.589.000</b>	
<b>2.20.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>90.589.000</b>	
<b>2.20.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>90.589.000</b>	
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	90.589.000	
<b>2.21</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>	<b>288.981.550</b>	
<b>2.16.2.21.2.20.01.0000</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN</b>	<b>288.981.550</b>	
<b>2.16.2.21.2.20.01.0000</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN</b>	<b>288.981.550</b>	
<b>2.21.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>288.981.550</b>	
<b>2.21.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>288.981.550</b>	
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	253.462.000	
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	35.519.550	
<b>2.22</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>	<b>2.389.999.500</b>	
<b>2.22.3.26.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b>	<b>2.389.999.500</b>	
<b>2.22.3.26.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b>	<b>2.389.999.500</b>	
<b>2.22.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	<b>1.849.999.500</b>	
<b>2.22.02.2.02</b>	<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.249.999.800</b>	
2.22.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	1.249.999.800	
<b>2.22.02.2.03</b>	<b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>599.999.700</b>	
2.22.02.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	599.999.700	
<b>2.22.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	<b>540.000.000</b>	
<b>2.22.03.2.01</b>	<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>540.000.000</b>	
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	540.000.000	
<b>2.23</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>	<b>10.321.944.757</b>	
<b>2.23.2.24.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>	<b>10.321.944.757</b>	
<b>2.23.2.24.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>	<b>10.321.944.757</b>	
<b>2.23.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8.931.976.957</b>	
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.942.300	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.935.000	
2.23.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.732.500	
2.23.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.959.400	
2.23.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.350.000	
2.23.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.558.400	
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.407.000	
<b>2.23.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.559.647.081</b>	
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.557.422.081	
2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.225.000	
<b>2.23.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>1.862.000</b>	
2.23.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.862.000	
<b>2.23.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>64.236.000</b>	
2.23.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	36.036.000	
2.23.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28.200.000	
<b>2.23.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>716.041.200</b>	
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.500.000	
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	193.082.800	
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.544.000	
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.626.400	
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	412.088.000	
<b>2.23.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>3.169.230.000</b>	
2.23.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	560.000.000	
2.23.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	45.830.000	
2.23.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.563.400.000	
<b>2.23.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.086.563.376</b>	
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.302.800	
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	916.260.576	
<b>2.23.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>317.455.000</b>	
2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	143.757.000	
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.106.000	
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.592.000	
<b>2.23.02</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>1.205.968.050</b>	
<b>2.23.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>497.505.050</b>	
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	113.382.600	
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	144.326.200	
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	239.796.250	
<b>2.23.02.2.02</b>	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>708.463.000</b>	
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	251.861.500	
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	162.912.500	
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	201.695.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.23.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	91.994.000	
<b>2.23.03</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>	<b>183.999.750</b>	
<b>2.23.03.2.01</b>	<b>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>183.999.750</b>	
2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	183.999.750	
<b>2.24</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>	<b>477.527.400</b>	
<b>2.23.2.24.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>	<b>477.527.400</b>	
<b>2.23.2.24.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>	<b>477.527.400</b>	
<b>2.24.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	<b>94.319.000</b>	
<b>2.24.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>47.364.000</b>	
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	47.364.000	
<b>2.24.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>46.955.000</b>	
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	46.955.000	
<b>2.24.03</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>	<b>383.208.400</b>	
<b>2.24.03.2.01</b>	<b>Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun</b>	<b>70.767.300</b>	
2.24.03.2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	70.767.300	
<b>2.24.03.2.02</b>	<b>Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota</b>	<b>134.677.100</b>	
2.24.03.2.02.02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	134.677.100	
<b>2.24.03.2.03</b>	<b>Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan</b>	<b>87.387.900</b>	
2.24.03.2.03.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	87.387.900	
<b>2.24.03.2.05</b>	<b>Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang</b>	<b>90.376.100</b>	
2.24.03.2.05.03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	90.376.100	
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>		
<b>3.25</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>18.860.882.586</b>	
<b>3.25.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERIKANAN</b>	<b>18.860.882.586</b>	
<b>3.25.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERIKANAN</b>	<b>18.860.882.586</b>	
<b>3.25.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8.549.713.016</b>	
<b>3.25.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>388.608.550</b>	
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	350.108.850	
3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.499.700	
<b>3.25.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.110.285.254</b>	
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.106.285.454	
3.25.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.999.800	
<b>3.25.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>41.560.000</b>	
3.25.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	41.560.000	
<b>3.25.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.019.616.700</b>	
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.000	
3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	299.497.000	
3.25.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43.000.000	
3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.996.000	
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.250.700	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	632.874.000	
<b>3.25.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>267.976.000</b>	
3.25.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.000.000	
3.25.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	197.976.000	
<b>3.25.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.713.416.838</b>	
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	169.999.230	
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.543.417.608	
<b>3.25.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.008.249.674</b>	
3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	199.995.874	
3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.992.000	
3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	798.261.800	
<b>3.25.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>1.967.075.000</b>	
<b>3.25.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.867.075.000</b>	
3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	59.995.000	
3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1.807.080.000	
<b>3.25.03.2.02</b>	<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100.000.000</b>	
3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	100.000.000	
<b>3.25.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>6.263.239.700</b>	
<b>3.25.04.2.02</b>	<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	<b>4.323.530.000</b>	
3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	3.703.290.800	
3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	470.239.200	
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	150.000.000	
<b>3.25.04.2.04</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>1.939.709.700</b>	
3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	157.034.200	
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.082.675.500	
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000	
3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	
<b>3.25.05</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>817.234.000</b>	
<b>3.25.05.2.01</b>	<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</b>	<b>817.234.000</b>	
3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	817.234.000	
<b>3.25.06</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>1.263.620.870</b>	
<b>3.25.06.2.01</b>	<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>100.000.000</b>	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	
<b>3.25.06.2.02</b>	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>108.413.870</b>	
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	108.413.870	
<b>3.25.06.2.03</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>1.055.207.000</b>	
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	359.650.000	
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	695.557.000	
<b>3.26</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>	<b>9.285.980.527</b>	
<b>2.22.3.26.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b>	<b>9.285.980.527</b>	
<b>2.22.3.26.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b>	<b>9.285.980.527</b>	
<b>3.26.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.335.113.727</b>	
<b>3.26.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>190.220.000</b>	
3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.220.000	
3.26.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.000.000	
<b>3.26.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.040.252.132</b>	
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.029.313.782	
3.26.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.938.350	
<b>3.26.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>101.714.000</b>	
3.26.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	101.714.000	
<b>3.26.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.035.649.990</b>	
3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.237.000	
3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	196.717.040	
3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	187.997.000	
3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	149.845.950	
3.26.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.960.000	
3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	441.893.000	
<b>3.26.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>735.214.850</b>	
3.26.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500.000.000	
3.26.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	35.215.000	
3.26.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.999.850	
<b>3.26.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>923.589.205</b>	
3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.613.645	
3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	831.975.560	
<b>3.26.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>308.473.550</b>	
3.26.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.859.200	
3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	101.244.250	
3.26.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.370.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.26.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.100	
<b>3.26.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>1.559.999.650</b>	
<b>3.26.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>1.359.999.850</b>	
3.26.02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.359.999.850	
<b>3.26.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>199.999.800</b>	
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	199.999.800	
<b>3.26.03</b>	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>400.867.000</b>	
<b>3.26.03.2.01</b>	<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>400.867.000</b>	
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	334.867.000	
3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	66.000.000	
<b>3.26.05</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>990.000.150</b>	
<b>3.26.05.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	<b>990.000.150</b>	
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	200.000.000	
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	490.000.050	
3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	300.000.100	
<b>3.27</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>	<b>48.248.130.200</b>	
<b>3.27.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>	<b>29.083.234.006</b>	
<b>3.27.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>	<b>29.083.234.006</b>	
<b>3.27.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>21.100.470.676</b>	
<b>3.27.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>6.202.650</b>	
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.202.650	
<b>3.27.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>16.763.414.176</b>	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.757.179.226	
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.234.950	
<b>3.27.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.510.613.500</b>	
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	59.696.000	
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	257.785.000	
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	241.800.000	
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150.261.500	
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	110.597.000	
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	690.474.000	
<b>3.27.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>515.100.000</b>	
3.27.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	515.100.000	
<b>3.27.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.539.141.250</b>	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.323.750	
3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.560.000	
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.427.257.500	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>3.27.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>765.999.100</b>	
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.947.000	
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.832.100	
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	704.220.000	
<b>3.27.02</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>1.261.686.880</b>	
<b>3.27.02.2.01</b>	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>1.261.686.880</b>	
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	471.177.000	
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	790.509.880	
<b>3.27.03</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>4.941.526.450</b>	
<b>3.27.03.2.01</b>	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>2.644.536.450</b>	
3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	2.359.400.200	
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	285.136.250	
<b>3.27.03.2.02</b>	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>2.296.990.000</b>	
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	374.995.000	
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.097.807.000	
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	824.188.000	
<b>3.27.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>500.000.000</b>	
<b>3.27.05.2.01</b>	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>500.000.000</b>	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	500.000.000	
<b>3.27.06</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>334.634.000</b>	
<b>3.27.06.2.01</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>334.634.000</b>	
3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	334.634.000	
<b>3.27.07</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>944.916.000</b>	
<b>3.27.07.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>944.916.000</b>	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	569.919.000	
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	374.997.000	
<b>3.27.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>	<b>19.164.896.194</b>	
<b>3.27.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>	<b>19.164.896.194</b>	
<b>3.27.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>10.281.621.644</b>	
<b>3.27.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>333.388.675</b>	
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	289.679.870	
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	43.708.805	
<b>3.27.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.942.142.316</b>	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.939.107.576	
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.034.740	

1	2	3	4
	<b>Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan</b>	<b>Plafon Anggaran Sementara</b>	<b>Ket</b>
<b>3.27.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.426.293.416</b>	
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.016.970	
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	622.584.126	
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	118.215.000	
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	84.710.320	
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36.768.000	
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	550.999.000	
<b>3.27.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.088.086.337</b>	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	189.339.600	
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	898.746.737	
<b>3.27.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>491.710.900</b>	
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	249.938.500	
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.772.400	
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	192.000.000	
<b>3.27.02</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>3.497.062.685</b>	
<b>3.27.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>1.815.633.165</b>	
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	390.913.000	
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1.424.720.165	
<b>3.27.02.2.03</b>	<b>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>143.736.000</b>	
3.27.02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	143.736.000	
<b>3.27.02.2.04</b>	<b>Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer</b>	<b>55.149.120</b>	
3.27.02.2.04.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	55.149.120	
<b>3.27.02.2.05</b>	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>712.557.400</b>	
3.27.02.2.05.01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	712.557.400	
<b>3.27.02.2.06</b>	<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>	<b>769.987.000</b>	
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	769.987.000	
<b>3.27.03</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>2.018.963.685</b>	
<b>3.27.03.2.01</b>	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>289.978.230</b>	
3.27.03.2.01.04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	289.978.230	
<b>3.27.03.2.02</b>	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>1.728.985.455</b>	
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.728.985.455	
<b>3.27.04</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>1.511.218.280</b>	
<b>3.27.04.2.01</b>	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>887.069.460</b>	
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	43.166.880	
3.27.04.2.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	843.902.580	
<b>3.27.04.2.04</b>	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>130.550.550</b>	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	130.550.550	
<b>3.27.04.2.05</b>	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan</b>	<b>493.598.270</b>	
3.27.04.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	493.598.270	
<b>3.27.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>489.700.315</b>	
<b>3.27.05.2.01</b>	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>489.700.315</b>	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	368.199.025	
3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	121.501.290	
<b>3.27.06</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>320.002.607</b>	
<b>3.27.06.2.01</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>320.002.607</b>	
3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	320.002.607	
<b>3.27.07</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>1.046.326.978</b>	
<b>3.27.07.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>1.046.326.978</b>	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	549.953.650	
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	70.220.223	
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	426.153.105	
<b>3.30</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>	<b>907.902.410</b>	
<b>3.30.2.17.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL</b>	<b>907.902.410</b>	
<b>3.30.2.17.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL</b>	<b>907.902.410</b>	
<b>3.30.02</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	<b>158.899.500</b>	
<b>3.30.02.2.01</b>	<b>Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</b>	<b>62.673.500</b>	
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	62.673.500	
<b>3.30.02.2.02</b>	<b>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>	<b>22.837.000</b>	
3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	22.837.000	
<b>3.30.02.2.06</b>	<b>Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>73.389.000</b>	
3.30.02.2.06.01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	73.389.000	
<b>3.30.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>68.010.950</b>	
<b>3.30.03.2.02</b>	<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	<b>68.010.950</b>	
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	32.219.950	
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	35.791.000	
<b>3.30.04</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>200.192.950</b>	
<b>3.30.04.2.01</b>	<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>86.348.450</b>	
3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	86.348.450	
<b>3.30.04.2.02</b>	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	<b>63.883.750</b>	
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	29.608.650	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	34.275.100	
<b>3.30.04.2.03</b>	<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>49.960.750</b>	
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	49.960.750	
<b>3.30.06</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>387.245.010</b>	
<b>3.30.06.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	<b>387.245.010</b>	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	278.070.210	
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	109.174.800	
<b>3.30.07</b>	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>93.554.000</b>	
<b>3.30.07.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>93.554.000</b>	
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	93.554.000	
<b>3.31</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>	<b>8.391.699.558</b>	
<b>2.07.3.31.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA</b>	<b>8.391.699.558</b>	
<b>2.07.3.31.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA</b>	<b>8.391.699.558</b>	
<b>3.31.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.608.164.858</b>	
<b>3.31.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>213.008.000</b>	
3.31.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	112.352.000	
3.31.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.810.000	
3.31.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.294.000	
3.31.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.037.000	
3.31.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.295.000	
3.31.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.400.000	
3.31.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.820.000	
<b>3.31.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.957.122.528</b>	
3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.946.512.528	
3.31.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.000.000	
3.31.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.610.000	
<b>3.31.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>48.556.000</b>	
3.31.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	37.856.000	
3.31.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.700.000	
<b>3.31.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>624.992.000</b>	
3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	
3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.000.000	
3.31.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90.000.000	
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.350.000	
3.31.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.190.000	
3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.452.000	
<b>3.31.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>303.857.000</b>	
3.31.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.000.000	
3.31.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	118.680.000	
3.31.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	133.177.000	
<b>3.31.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.300.364.620</b>	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.192.000	
3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.165.172.620	
<b>3.31.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>160.264.710</b>	
3.31.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	139.586.710	
3.31.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.678.000	
<b>3.31.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>1.534.084.100</b>	
<b>3.31.02.2.01</b>	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>1.534.084.100</b>	
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	215.456.000	
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	358.628.400	
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	959.999.700	
<b>3.31.03</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	<b>99.531.650</b>	
<b>3.31.03.2.01</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>99.531.650</b>	
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	99.531.650	
<b>3.31.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>149.918.950</b>	
<b>3.31.04.2.01</b>	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>149.918.950</b>	
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	49.994.800	
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	49.989.500	
3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	49.934.650	
<b>4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			
<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>92.065.563.830</b>	
<b>4.01.3.29.5.06.01.0000</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>92.065.563.830</b>	
<b>4.01.0.00.0.00.01.0001</b>	<b>BAGIAN UMUM</b>	<b>37.423.098.188</b>	
<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>37.423.098.188</b>	
<b>4.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1.493.223.100</b>	
4.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	98.528.400	
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	947.980.000	
4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	57.880.400	
4.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4.954.400	
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	383.879.900	
<b>4.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>10.586.256.500</b>	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	372.219.000	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	830.703.500	
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	468.169.000	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.725.000.000	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	429.520.500	
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	87.605.900	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	183.150.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.489.888.600	
<b>4.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>5.169.428.000</b>	
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	702.718.000	
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.000.000	
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	104.712.000	
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	206.429.000	
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	608.549.000	
4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.477.020.000	
<b>4.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>13.317.267.008</b>	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	586.841.700	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.335.572.835	
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.710.980.000	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.683.872.473	
<b>4.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4.275.079.580</b>	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.464.833.470	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	779.556.110	
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	251.540.000	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	181.410.000	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	798.209.000	
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	799.531.000	
<b>4.01.01.2.11</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>519.384.000</b>	
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	503.350.000	
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	16.034.000	
<b>4.01.01.2.12</b>	<b>Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>2.062.460.000</b>	
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.512.460.000	
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	50.000.000	
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	500.000.000	
<b>4.01.0.00.0.00.01.0002</b>	<b>BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN</b>	<b>4.799.998.150</b>	
<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.799.998.150</b>	
<b>4.01.01.2.14</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>4.799.998.150</b>	
4.01.01.2.14.01	Fasilitas Keprotokolan	3.999.999.850	
4.01.01.2.14.02	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	299.998.300	
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	500.000.000	
<b>4.01.0.00.0.00.01.0003</b>	<b>BAGIAN ORGANISASI</b>	<b>1.152.471.250</b>	
<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.152.471.250</b>	
<b>4.01.01.2.13</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>1.152.471.250</b>	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	451.254.300	
4.01.01.2.13.02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	216.928.350	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	134.295.900	
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	226.034.350	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	123.958.350	
<b>4.01.0.00.0.00.01.0004</b>	<b>BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN</b>	<b>25.335.440.492</b>	
<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>25.335.440.492</b>	
<b>4.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>1.509.531.050</b>	
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	799.542.300	
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	109.999.900	
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	99.992.450	
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100.000.000	
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	99.999.900	
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	299.996.500	
<b>4.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>20.714.341.274</b>	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.354.342.224	
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	99.999.700	
4.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	119.999.900	
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	79.999.750	
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	59.999.700	
<b>4.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>2.337.116.300</b>	
4.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	119.999.800	
4.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	99.999.700	
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.117.116.800	
<b>4.01.01.2.11</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>774.451.868</b>	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	174.451.868	
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	
<b>4.01.0.00.0.00.01.0005</b>	<b>BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>15.487.569.600</b>	
<b>4.01.02</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>15.487.569.600</b>	
<b>4.01.02.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>15.487.569.600</b>	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	9.907.179.450	
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	3.642.820.100	
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.688.240.250	
4.01.02.2.02.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	249.329.800	
<b>4.01.0.00.0.00.01.0006</b>	<b>BAGIAN HUKUM</b>	<b>926.217.650</b>	
<b>4.01.02</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>926.217.650</b>	
<b>4.01.02.2.03</b>	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>926.217.650</b>	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	299.283.900	
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	409.080.250	
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	217.853.500	
<b>4.01.0.00.0.00.01.0007</b>	<b>BAGIAN KERJASAMA</b>	<b>831.616.800</b>	
<b>4.01.02</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>831.616.800</b>	
<b>4.01.02.2.04</b>	<b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>	<b>831.616.800</b>	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	755.520.500	
4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	22.911.300	
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	53.185.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>4.01.0.00.0.00.01.0008</b>	<b>BAGIAN TATA PEMERINTAHAN</b>	<b>1.915.587.700</b>	
<b>4.01.02</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>1.915.587.700</b>	
<b>4.01.02.2.01</b>	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>1.915.587.700</b>	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	274.968.000	
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1.243.395.000	
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	397.224.700	
<b>4.01.0.00.0.00.01.0009</b>	<b>BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	<b>704.356.600</b>	
<b>4.01.03</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>704.356.600</b>	
<b>4.01.03.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>704.356.600</b>	
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	333.798.600	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	185.321.800	
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	185.236.200	
<b>4.01.0.00.0.00.01.0010</b>	<b>BAGIAN PEREKONOMIAN</b>	<b>738.445.200</b>	
<b>4.01.03</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>738.445.200</b>	
<b>4.01.03.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>738.445.200</b>	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	236.793.500	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	337.182.000	
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	164.469.700	
<b>4.01.0.00.0.00.01.0011</b>	<b>BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>	<b>2.016.625.400</b>	
<b>4.01.03</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>2.016.625.400</b>	
<b>4.01.03.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>2.016.625.400</b>	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	890.741.800	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	851.213.400	
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	274.670.200	
<b>4.01.0.00.0.00.01.0012</b>	<b>BAGIAN SUMBER DAYA ALAM</b>	<b>734.136.800</b>	
<b>4.01.03</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>734.136.800</b>	
<b>4.01.03.2.04</b>	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>734.136.800</b>	
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	465.820.000	
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	123.697.250	
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	144.619.550	
<b>4.02</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>88.329.119.571</b>	
<b>4.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>	<b>88.329.119.571</b>	
<b>4.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>	<b>88.329.119.571</b>	
<b>4.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>48.398.310.671</b>	
<b>4.02.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>122.280.000</b>	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.200.000	
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.270.000	
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.270.000	
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.270.000	
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	15.270.000	
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	54.000.000	
<b>4.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.719.836.752</b>	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.708.563.752	
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.273.000	
<b>4.02.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1.536.121.000</b>	
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	147.220.000	
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.388.901.000	
<b>4.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>813.554.250</b>	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.016.000	
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	176.208.250	
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.715.000	
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.385.000	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	542.230.000	
<b>4.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>274.415.000</b>	
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	74.415.000	
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000	
<b>4.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.448.609.350</b>	
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	576.990.780	
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	189.989.000	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.675.629.570	
<b>4.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.231.868.000</b>	
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	346.110.000	
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	887.508.000	
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	817.180.000	
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	101.770.000	
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	79.300.000	
<b>4.02.01.2.15</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>35.329.783.319</b>	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	34.196.506.319	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.051.422.000	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	81.855.000	
<b>4.02.01.2.16</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>921.843.000</b>	
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	471.584.000	
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	450.259.000	
<b>4.02.02</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>39.930.808.900</b>	
<b>4.02.02.2.01</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>4.747.320.400</b>	
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.283.153.800	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3.269.421.600	
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	194.745.000	
<b>4.02.02.2.02</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>1.389.524.400</b>	
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	447.713.800	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	235.717.200	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	126.689.800	
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	126.689.800	
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	452.713.800	
<b>4.02.02.2.03</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>8.529.890.600</b>	
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.914.651.400	
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	2.784.190.400	
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	2.001.134.000	
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.614.112.000	
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	215.802.800	
<b>4.02.02.2.04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>7.067.229.800</b>	
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	1.399.680.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	3.243.269.800	
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	733.200.000	
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	384.000.000	
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1.307.080.000	
<b>4.02.02.2.05</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>2.075.740.000</b>	
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	382.120.000	
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	53.220.000	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	1.640.400.000	
<b>4.02.02.2.06</b>	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>78.896.600</b>	
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	78.896.600	
<b>4.02.02.2.08</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>16.042.207.100</b>	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12.687.182.900	
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.068.475.600	
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2.286.548.600	
<b>5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			
<b>5.01</b>	<b>PERENCANAAN</b>	<b>20.012.503.414</b>	
<b>5.01.5.05.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>20.012.503.414</b>	
<b>5.01.5.05.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>20.012.503.414</b>	
<b>5.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>13.178.804.164</b>	
<b>5.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>349.423.300</b>	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	127.688.900	
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	39.157.000	
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	28.143.000	
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	28.766.600	
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.972.000	
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	51.883.800	
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.812.000	
<b>5.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.889.560.540</b>	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.819.521.540	
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	29.451.000	
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	40.588.000	
<b>5.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>357.134.350</b>	
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	131.478.000	
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	225.656.350	
<b>5.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2.810.602.936</b>	
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	126.485.000	
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.414.913.936	
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	118.630.000	
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	134.550.000	
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	69.120.000	
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	946.904.000	
<b>5.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.058.823.038</b>	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117.000.000	
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	941.823.038	
<b>5.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.713.260.000</b>	
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	368.410.000	
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.630.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.224.220.000	
<b>5.01.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>3.174.596.550</b>	
<b>5.01.02.2.01</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>2.041.824.400</b>	
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	212.988.700	
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	392.437.500	
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	46.501.700	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	398.095.500	
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	166.230.500	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	825.570.500	
<b>5.01.02.2.02</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>657.168.200</b>	
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	548.547.700	
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	108.620.500	
<b>5.01.02.2.03</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>475.603.950</b>	
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	205.231.650	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	270.372.300	
<b>5.01.03</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>3.659.102.700</b>	
<b>5.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>1.260.636.500</b>	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	70.077.000	
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	53.124.000	
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	80.132.000	
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	164.213.600	
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	98.019.000	
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	136.146.000	
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	91.925.000	
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	566.999.900	
<b>5.01.03.2.02</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>990.027.100</b>	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	75.746.800	
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	133.714.600	
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	89.992.650	
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	92.836.350	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	371.204.700	
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	43.180.750	
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	140.514.750	
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	42.836.500	
<b>5.01.03.2.03</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah</b>	<b>1.408.439.100</b>	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	198.787.100	
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	21.640.000	
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	87.473.000	
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	417.277.450	
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	218.509.500	
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	18.087.700	
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	46.893.850	
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	399.770.500	
<b>5.02</b>	<b>KEUANGAN</b>	<b>408.611.975.118</b>	
<b>5.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>	<b>387.351.759.797</b>	
<b>5.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>	<b>387.351.759.797</b>	
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>16.095.580.179</b>	
<b>5.02.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>57.494.000</b>	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	57.494.000	
<b>5.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>12.567.827.730</b>	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.558.461.230	
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.366.500	
<b>5.02.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>437.356.700</b>	
5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	437.356.700	
<b>5.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.399.498.900</b>	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	274.136.900	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	199.994.000	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	199.696.000	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	710.672.000	
<b>5.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.304.340.849</b>	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	264.369.000	
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	157.310.000	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	882.661.849	
<b>5.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>279.990.000</b>	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	279.990.000	
<b>5.02.01.2.13</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>49.072.000</b>	
5.02.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	49.072.000	
<b>5.02.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>370.432.750.618</b>	
<b>5.02.02.2.01</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>766.877.500</b>	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	74.087.000	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	74.087.000	
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	68.977.000	
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	68.977.000	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	228.341.750	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	228.341.750	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	24.066.000	
<b>5.02.02.2.02</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>450.223.300</b>	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	96.320.000	
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	142.629.400	
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	211.273.900	
<b>5.02.02.2.03</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>484.191.000</b>	
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	95.265.000	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	388.926.000	
<b>5.02.02.2.04</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>368.731.458.818</b>	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	346.040.725.640	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	7.000.000.000	
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	15.690.733.178	
<b>5.02.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>823.429.000</b>	
<b>5.02.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>823.429.000</b>	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	334.285.000	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	275.000.000	
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	214.144.000	
<b>5.02.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>21.260.215.321</b>	
<b>5.02.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>21.260.215.321</b>	
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>17.412.764.221</b>	
<b>5.02.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>73.327.950</b>	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.517.050	
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.739.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.459.900	
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.178.000	
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.259.000	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.938.000	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.237.000	
<b>5.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>12.375.865.919</b>	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.327.295.119	
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.972.900	
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	34.597.900	
<b>5.02.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>636.600.000</b>	
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	275.000.000	
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	361.600.000	
<b>5.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2.045.048.500</b>	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	408.616.500	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	253.121.000	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	401.772.000	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.560.000	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	954.979.000	
<b>5.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>350.000.000</b>	
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	350.000.000	
<b>5.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.394.166.534</b>	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	332.700.010	
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.550.000	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	950.916.524	
<b>5.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>537.755.318</b>	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	231.635.318	
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	306.120.000	
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>3.847.451.100</b>	
<b>5.02.04.2.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>3.847.451.100</b>	
5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	93.263.000	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	500.503.300	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	222.055.300	
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	665.228.000	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	143.049.250	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	48.849.250	
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	677.036.200	
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	466.208.000	
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	38.249.200	
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	100.783.800	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	225.708.600	
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	137.584.000	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	300.990.200	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	37.155.000	
5.02.04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	190.788.000	
<b>5.03</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>	<b>10.838.132.599</b>	
<b>5.03.5.04.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA</b>	<b>10.838.132.599</b>	
<b>5.03.5.04.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA</b>	<b>10.838.132.599</b>	
<b>5.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.605.887.599</b>	
<b>5.03.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>277.590.250</b>	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	211.323.300	
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.019.750	
5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.059.800	
5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.059.800	
5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	8.059.800	
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.067.800	
<b>5.03.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.278.482.631</b>	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.275.116.431	
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.366.200	
<b>5.03.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>228.638.350</b>	
5.03.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	125.000.000	
5.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	103.638.350	
<b>5.03.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>919.234.400</b>	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.999.000	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	290.410.200	
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.534.200	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.382.000	
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.352.000	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	520.557.000	
<b>5.03.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>199.684.560</b>	
5.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	199.684.560	
<b>5.03.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>393.644.960</b>	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	127.835.000	
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	265.809.960	
<b>5.03.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>308.612.448</b>	
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57.440.616	
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.561.832	
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.610.000	
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	
<b>5.03.02</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>4.232.245.000</b>	
<b>5.03.02.2.01</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>1.232.238.050</b>	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	500.000.000	
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	174.883.300	
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	33.195.700	
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	90.752.850	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	158.406.500	
5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	274.999.700	
<b>5.03.02.2.02</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>1.318.774.850</b>	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	144.710.000	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	545.420.850	
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	628.644.000	
<b>5.03.02.2.03</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>1.073.573.000</b>	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1.073.573.000	
<b>5.03.02.2.04</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>607.659.100</b>	
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	79.578.000	
5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	352.785.650	
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	69.849.000	
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	43.703.550	
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	61.742.900	
<b>5.04</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	<b>923.903.700</b>	
<b>5.03.5.04.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA</b>	<b>923.903.700</b>	
<b>5.03.5.04.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA</b>	<b>923.903.700</b>	
<b>5.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>923.903.700</b>	
<b>5.04.02.2.01</b>	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>160.000.000</b>	
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	160.000.000	
<b>5.04.02.2.02</b>	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>763.903.700</b>	
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	763.903.700	
<b>5.05</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>1.137.286.500</b>	
<b>5.01.5.05.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>1.137.286.500</b>	
<b>5.01.5.05.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>1.137.286.500</b>	
<b>5.05.02</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>1.137.286.500</b>	
<b>5.05.02.2.01</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>405.474.500</b>	
5.05.02.2.01.14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	405.474.500	
<b>5.05.02.2.02</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>195.753.000</b>	
5.05.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	195.753.000	
<b>5.05.02.2.03</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>198.554.000</b>	
5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	198.554.000	
<b>5.05.02.2.04</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>337.505.000</b>	
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	337.505.000	
<b>5.06</b>	<b>PENGELOLAAN PERBATASAN</b>	<b>249.996.000</b>	
<b>4.01.3.29.5.06.01.0000</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>249.996.000</b>	
<b>4.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>BAGIAN TATA PEMERINTAHAN</b>	<b>249.996.000</b>	
<b>5.06.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN</b>	<b>249.996.000</b>	
<b>5.06.02.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan</b>	<b>249.996.000</b>	
5.06.02.2.02.04	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	249.996.000	
<b>6</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
<b>6.01</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>	<b>20.723.223.028</b>	
<b>6.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>INSPEKTORAT</b>	<b>20.723.223.028</b>	
<b>6.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>INSPEKTORAT</b>	<b>20.723.223.028</b>	
<b>6.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>15.878.407.028</b>	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>6.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>90.850.000</b>	
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.450.000	
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	76.400.000	
<b>6.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>13.046.949.936</b>	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.041.449.936	
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.500.000	
<b>6.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>461.610.000</b>	
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	400.360.000	
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	61.250.000	
<b>6.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.027.426.250</b>	
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	41.308.000	
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	171.402.400	
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	129.250.000	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	88.758.850	
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	31.200.000	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	565.507.000	
<b>6.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>197.109.000</b>	
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	197.109.000	
<b>6.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>561.609.342</b>	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.931.200	
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	410.678.142	
<b>6.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>492.852.500</b>	
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85.250.000	
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	178.388.000	
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.092.500	
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	183.122.000	
<b>6.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>4.284.210.000</b>	
<b>6.01.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>3.741.210.000</b>	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	196.000.000	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.037.200.000	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	167.835.000	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	934.825.000	
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	964.800.000	
6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	9.250.000	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	431.300.000	
<b>6.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>543.000.000</b>	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	543.000.000	
<b>6.01.03</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>560.606.000</b>	
<b>6.01.03.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>18.500.000</b>	
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	18.500.000	
<b>6.01.03.2.02</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>542.106.000</b>	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	85.700.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	88.750.000	
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	353.170.000	
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	14.486.000	
<b>7 UNSUR KEWILAYAHAN</b>			
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>48.267.811.494</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>KECAMATAN KAMPAR KIRI</b>	<b>2.941.158.382</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>KECAMATAN KAMPAR KIRI</b>	<b>2.941.158.382</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.555.842.995</b>	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.924.187.263</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.922.587.513	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.599.750	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>8.934.000</b>	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8.934.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>294.559.200</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	104.458.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.704.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.271.200	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97.126.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>17.241.000</b>	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	7.241.000	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>260.334.750</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.171.940	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	235.162.810	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>50.586.782</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.610.782	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.994.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.982.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>365.515.387</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>365.515.387</b>	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	182.607.887	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	182.907.500	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>19.800.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>19.800.000</b>	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	19.800.000	
<b>7.01.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>KECAMATAN TAPUNG HILIR</b>	<b>2.479.471.708</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>KECAMATAN TAPUNG HILIR</b>	<b>2.479.471.708</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.467.921.708</b>	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.622.003.908</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.622.003.908	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>28.200.000</b>	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28.200.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>554.993.400</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.880.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.046.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	319.690.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.203.400	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.640.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	143.534.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>212.142.000</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.137.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199.005.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>50.582.400</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.182.400	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.400.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>11.550.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>11.550.000</b>	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.550.000	
<b>7.01.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>KECAMATAN TAPUNG HULU</b>	<b>1.837.165.204</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>KECAMATAN TAPUNG HULU</b>	<b>1.837.165.204</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.817.365.204</b>	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.148.399.939</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.148.399.939	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>37.600.000</b>	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	37.600.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>452.263.450</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.464.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.090.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	202.686.400	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.579.050	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.444.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>8.000.000</b>	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	8.000.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>118.683.600</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.633.600	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	97.050.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>52.418.215</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.907.015	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.511.200	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>19.800.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>19.800.000</b>	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	19.800.000	
<b>7.01.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>KECAMATAN TAPUNG</b>	<b>2.274.801.367</b>	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>KECAMATAN TAPUNG</b>	<b>2.274.801.367</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.263.251.367</b>	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.516.538.815</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.516.538.815	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>28.224.000</b>	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28.224.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>402.750.000</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.029.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	118.119.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	153.219.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.187.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.960.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.236.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>252.258.120</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.556.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	231.702.120	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>63.480.432</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.410.432	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.070.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>11.550.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>11.550.000</b>	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.550.000	
<b>7.01.0.00.0.00.05.0000</b>	<b>KECAMATAN TAMBANG</b>	<b>2.720.847.167</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.05.0000</b>	<b>KECAMATAN TAMBANG</b>	<b>2.720.847.167</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.709.297.167</b>	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.065.265.467</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.065.265.467	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>35.978.000</b>	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	35.978.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>389.659.500</b>	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	142.183.500	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	129.324.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.134.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102.018.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>178.841.000</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.876.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.965.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>39.553.200</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.868.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.685.200	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>11.550.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>11.550.000</b>	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.550.000	
<b>7.01.0.00.0.00.06.0000</b>	<b>KECAMATAN KAMPAR</b>	<b>3.710.892.916</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.06.0000</b>	<b>KECAMATAN KAMPAR</b>	<b>3.710.892.916</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.333.740.558</b>	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.368.677.960</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.368.677.960	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>39.632.000</b>	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	39.632.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>524.283.850</b>	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	171.978.800	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	143.281.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.740.050	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158.284.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>29.500.000</b>	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	29.500.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>299.139.200</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.239.200	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	266.900.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>72.507.548</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.027.548	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.480.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>365.452.358</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>365.452.358</b>	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	206.452.358	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	159.000.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>11.700.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>11.700.000</b>	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.700.000	
<b>7.01.0.00.0.00.07.0000</b>	<b>KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU</b>	<b>2.088.568.413</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.07.0000</b>	<b>KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU</b>	<b>2.088.568.413</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.077.018.413</b>	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.581.849.631</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.581.849.631	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>328.966.200</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.686.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103.033.200	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.936.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.115.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	131.196.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>127.728.250</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.311.340	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	114.416.910	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>38.474.332</b>	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.465.432	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.008.900	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>11.550.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>11.550.000</b>	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.550.000	
<b>7.01.0.00.0.00.08.0000</b>	<b>KECAMATAN SIAK HULU</b>	<b>3.066.705.055</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.08.0000</b>	<b>KECAMATAN SIAK HULU</b>	<b>3.066.705.055</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.055.155.055</b>	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.332.784.723</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.332.784.723	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>498.543.900</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.366.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	244.040.300	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.654.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.177.600	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102.306.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>153.165.000</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.540.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	128.625.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>70.661.432</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	62.926.432	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.735.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>11.550.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>11.550.000</b>	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.550.000	
<b>7.01.0.00.0.00.09.0000</b>	<b>KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR</b>	<b>2.642.405.875</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.09.0000</b>	<b>KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR</b>	<b>2.642.405.875</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.265.040.441</b>	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.791.699.042</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.791.699.042	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>9.400.000</b>	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9.400.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>179.343.200</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.017.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.990.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.319.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.817.200	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.700.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>238.401.600</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.201.600	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	220.200.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>46.196.599</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.784.299	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.412.300	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>365.815.434</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>365.815.434</b>	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	208.201.434	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	157.614.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>11.550.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>11.550.000</b>	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.550.000	
<b>7.01.0.00.0.00.10.0000</b>	<b>KECAMATAN RUMBIO JAYA</b>	<b>1.595.678.213</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.10.0000</b>	<b>KECAMATAN RUMBIO JAYA</b>	<b>1.595.678.213</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.575.878.213</b>	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.135.435.197</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.135.435.197	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>259.579.100</b>	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.496.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.283.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.168.100	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	148.632.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>147.827.740</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.677.740	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	126.150.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>33.036.176</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.458.176	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.578.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>19.800.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>19.800.000</b>	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	19.800.000	
<b>7.01.0.00.0.00.11.0000</b>	<b>KECAMATAN KAMPAR UTARA</b>	<b>1.343.023.458</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.11.0000</b>	<b>KECAMATAN KAMPAR UTARA</b>	<b>1.343.023.458</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.328.173.458</b>	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>728.471.466</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	728.471.466	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>326.057.250</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.948.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.171.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	133.250.200	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.900.050	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.804.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	103.984.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>20.328.000</b>	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	12.912.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.416.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>186.420.810</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.986.810	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	168.434.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>66.895.932</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.013.932	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.800.000	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.082.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>14.850.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>14.850.000</b>	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14.850.000	
<b>7.01.0.00.0.00.12.0000</b>	<b>KECAMATAN KAMPA</b>	<b>1.813.849.358</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.12.0000</b>	<b>KECAMATAN KAMPA</b>	<b>1.813.849.358</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.802.299.358</b>	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.239.480.100</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.239.480.100	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>352.283.250</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.560.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	136.009.100	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95.943.800	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.250.350	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.520.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>181.546.500</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.891.500	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	164.655.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>28.989.508</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.351.208	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.638.300	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>11.550.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>11.550.000</b>	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.550.000	
<b>7.01.0.00.0.00.13.0000</b>	<b>KECAMATAN SALO</b>	<b>1.368.060.908</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.13.0000</b>	<b>KECAMATAN SALO</b>	<b>1.368.060.908</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.356.510.908</b>	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>896.184.398</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	896.184.398	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>227.562.000</b>	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	105.044.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.104.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.022.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.392.000	



Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>194.932.260</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.897.260	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	178.035.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>37.832.250</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.012.250	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.820.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>11.550.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>11.550.000</b>	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.550.000	
<b>7.01.0.00.0.00.14.0000</b>	<b>KECAMATAN BANGKINANG</b>	<b>3.363.325.647</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.14.0000</b>	<b>KECAMATAN BANGKINANG</b>	<b>3.363.325.647</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.679.425.647</b>	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.979.342.791</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.979.342.791	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>329.716.000</b>	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.714.600	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	128.926.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.027.400	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.048.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>26.646.000</b>	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.646.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>310.516.056</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.516.056	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	289.000.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>33.204.800</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.204.800	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>667.400.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>667.400.000</b>	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	454.400.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	213.000.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>16.500.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>16.500.000</b>	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16.500.000	
<b>7.01.0.00.0.00.15.0000</b>	<b>KECAMATAN KUOK</b>	<b>1.622.318.516</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.15.0000</b>	<b>KECAMATAN KUOK</b>	<b>1.622.318.516</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.610.768.516</b>	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.281.642.166</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.281.642.166	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>129.879.050</b>	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.535.800	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.730.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.745.250	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.868.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>171.059.100</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.599.100	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	152.460.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>28.188.200</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.253.200	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.935.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>11.550.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>11.550.000</b>	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.550.000	
<b>7.01.0.00.0.00.16.0000</b>	<b>KECAMATAN BANGKINANG KOTA</b>	<b>3.696.563.103</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.16.0000</b>	<b>KECAMATAN BANGKINANG KOTA</b>	<b>3.696.563.103</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.949.713.552</b>	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.280.281.320</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.274.806.320	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.475.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>320.344.400</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.985.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	159.868.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.185.400	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.306.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>20.480.000</b>	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.480.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>261.654.100</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.944.100	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	188.710.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>66.953.732</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.646.232	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.307.500	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>731.999.551</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>731.999.551</b>	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	342.983.001	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	389.016.550	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>14.850.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>14.850.000</b>	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14.850.000	
<b>7.01.0.00.0.00.17.0000</b>	<b>KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH</b>	<b>2.252.293.600</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.17.0000</b>	<b>KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH</b>	<b>2.252.293.600</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.232.493.600</b>	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.656.323.437</b>	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.656.323.437	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>9.400.000</b>	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9.400.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>411.908.448</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.303.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.307.948	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	197.167.500	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.032.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.168.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.930.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>6.222.660</b>	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	6.222.660	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>113.546.800</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.671.800	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	95.875.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>35.092.255</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.493.255	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.599.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>19.800.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>19.800.000</b>	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	19.800.000	
<b>7.01.0.00.0.00.18.0000</b>	<b>KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR</b>	<b>2.506.335.390</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.18.0000</b>	<b>KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR</b>	<b>2.506.335.390</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.028.785.590</b>	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.558.004.784</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.558.004.784	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>220.567.924</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.658.100	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.065.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.657.600	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.167.224	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.020.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>10.566.000</b>	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.566.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>191.946.000</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.226.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	162.720.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>47.700.882</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.828.382	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.872.500	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>99.999.800</b>	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>99.999.800</b>	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	99.999.800	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>366.000.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>366.000.000</b>	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	287.750.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	78.250.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>11.550.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>11.550.000</b>	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.550.000	
<b>7.01.0.00.0.00.19.0000</b>	<b>KECAMATAN GUNUNG SAHILAN</b>	<b>1.468.263.665</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.19.0000</b>	<b>KECAMATAN GUNUNG SAHILAN</b>	<b>1.468.263.665</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.456.713.665</b>	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.066.123.017</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.066.123.017	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>9.400.000</b>	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9.400.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>169.009.590</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.458.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.580.400	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.429.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.306.190	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58.236.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>34.000.000</b>	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	4.000.000	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>151.691.950</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.607.950	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	136.084.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>26.489.108</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.150.908	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.338.200	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>11.550.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>11.550.000</b>	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.550.000	
<b>7.01.0.00.0.00.20.0000</b>	<b>KECAMATAN PERHENTIAN RAJA</b>	<b>1.980.306.799</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.20.0000</b>	<b>KECAMATAN PERHENTIAN RAJA</b>	<b>1.980.306.799</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.963.806.799</b>	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.423.406.831</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.423.406.831	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>9.000.000</b>	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9.000.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>296.495.100</b>	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.156.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.471.400	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	172.160.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.147.700	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58.560.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>59.634.000</b>	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	59.634.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>134.392.768</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.606.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.786.768	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>40.878.100</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.098.100	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.780.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>16.500.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>16.500.000</b>	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16.500.000	
<b>7.01.0.00.0.00.21.0000</b>	<b>KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU</b>	<b>1.495.776.750</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.21.0000</b>	<b>KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU</b>	<b>1.495.776.750</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.495.776.750</b>	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.162.053.934</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.162.053.934	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>140.686.000</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.666.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.169.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.965.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.886.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>152.046.000</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.206.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.840.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>40.990.816</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.170.816	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.820.000	
<b>8</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>		
<b>8.01</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>21.818.365.948</b>	
<b>8.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>21.818.365.948</b>	
<b>8.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>21.818.365.948</b>	
<b>8.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.763.130.398</b>	
<b>8.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>280.507.900</b>	
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	160.641.700	
8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	29.027.700	
8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	29.027.700	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.377.700	
8.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	11.377.700	
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.027.700	
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.027.700	
<b>8.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.516.749.669</b>	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.505.977.242	
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.772.427	
<b>8.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>999.443.900</b>	
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.930.000	
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	148.834.900	
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.300.000	
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	118.350.000	
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.960.000	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	665.069.000	
<b>8.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>399.900.000</b>	
8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	175.000.000	
8.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	224.900.000	
<b>8.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>721.274.929</b>	
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93.270.000	
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.275.000	
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	595.729.929	
<b>8.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>845.254.000</b>	
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	254.034.000	
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	411.860.000	
8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	179.360.000	
<b>8.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>2.390.306.600</b>	
<b>8.01.02.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>2.390.306.600</b>	
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	852.203.600	
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.538.103.000	
<b>8.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>6.876.206.750</b>	
<b>8.01.03.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>6.876.206.750</b>	
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.866.448.250	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	344.690.500	
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3.665.068.000	
<b>8.01.04</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>667.181.650</b>	
<b>8.01.04.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>667.181.650</b>	
8.01.04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	218.631.900	
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	448.549.750	
<b>8.01.05</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>2.078.677.650</b>	
<b>8.01.05.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>2.078.677.650</b>	
8.01.05.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.594.174.200	
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	179.295.650	
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	305.207.800	
<b>8.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>4.042.862.900</b>	
<b>8.01.06.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>4.042.862.900</b>	
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	884.303.150	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200.756.400	
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	766.499.100	
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2.191.304.250	

4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.

Plafon anggaran sementara disusun berdasarkan belanja yaitu terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja pegawai direncanakan sebesar Rp.871.663.380.111,00, belanja bunga Rp.0,00, belanja subsidi Rp.0,00, belanja barang dan jasa Rp.607.636.216.632,00, belanja hibah Rp.22.653.246.650,00, belanja bantuan sosial Rp.11.051.150.000,00, belanja modal Rp.164.458.043.938,00, belanja tidak terduga Rp.7.000.000.000,00, belanja bagi hasil Rp.15.690.733.178,00, dan belanja bantuan keuangan Rp.346.040.725.640,00 dan

Tabel 4.2 Plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023

NO	Uraian	RAPBD 2023
	<b>BELANJA DAERAH</b>	
	Belanja pegawai	871.663.380.111
	Belanja Subsidi	0
	Belanja Barang dan Jasa	607.636.216.632
	Belanja Hibah	22.653.246.650
	Belanja Bantuan Soaial	11.051.150.000
	Belanja Modal	164.458.043.938
	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000
	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000
	Belanja bagi hasil	15.690.733.178
	belanja bantuan keuangan	346.040.725.640
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>2.046.193.496.149</b>



## BAB V

### RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH.

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp.71.995.274.337,00 sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.0,00. Secara rinci pembiayaan daerah terlihat pada table berikut:

Tabel 5.1 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023

Kode	Pendapatan dan	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN	71.995.274.337,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan	71.995.274.337,00	
	Jumlah	70.000.000.000	
	Jumlah	0	
	Pembiayaan Netto	71.995.274.337,00	

**BAB VI**  
**PENUTUP**

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran Berkenaan dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD TA 2023.

Bangkinang,

2022

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH

KABUPATEN KAMPAR  
Selaku,  
PIHAK KEDUA



MUHAMMAD FAISAL, ST  
KETUA



TONY HIDAYAT, SE  
WAKIL KETUA



REPOL, S.Ag  
WAKIL KETUA



FAHMIL, SE  
WAKIL KETUA

Pj. BUPATI KAMPAR

Selaku,

PIHAK PERTAMA



DR. H. KAMSOL